



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 060/ *63* /I.11-WK/HK/2022

TENTANG
PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur yang menggambarkan tata hubungan kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur antar unit organisasi, perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan peta proses bisnis dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 02 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerinah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, Peta Sub Proses, serta Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun berdasarkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA ...

KELIMA : Terhadap dokumen peta proses bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan evaluasi dan pemantauan relevansi dan efektivitasnya oleh Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kabupaten Way Kanan, paling sedikit satu tahun sekali.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Juni 2022

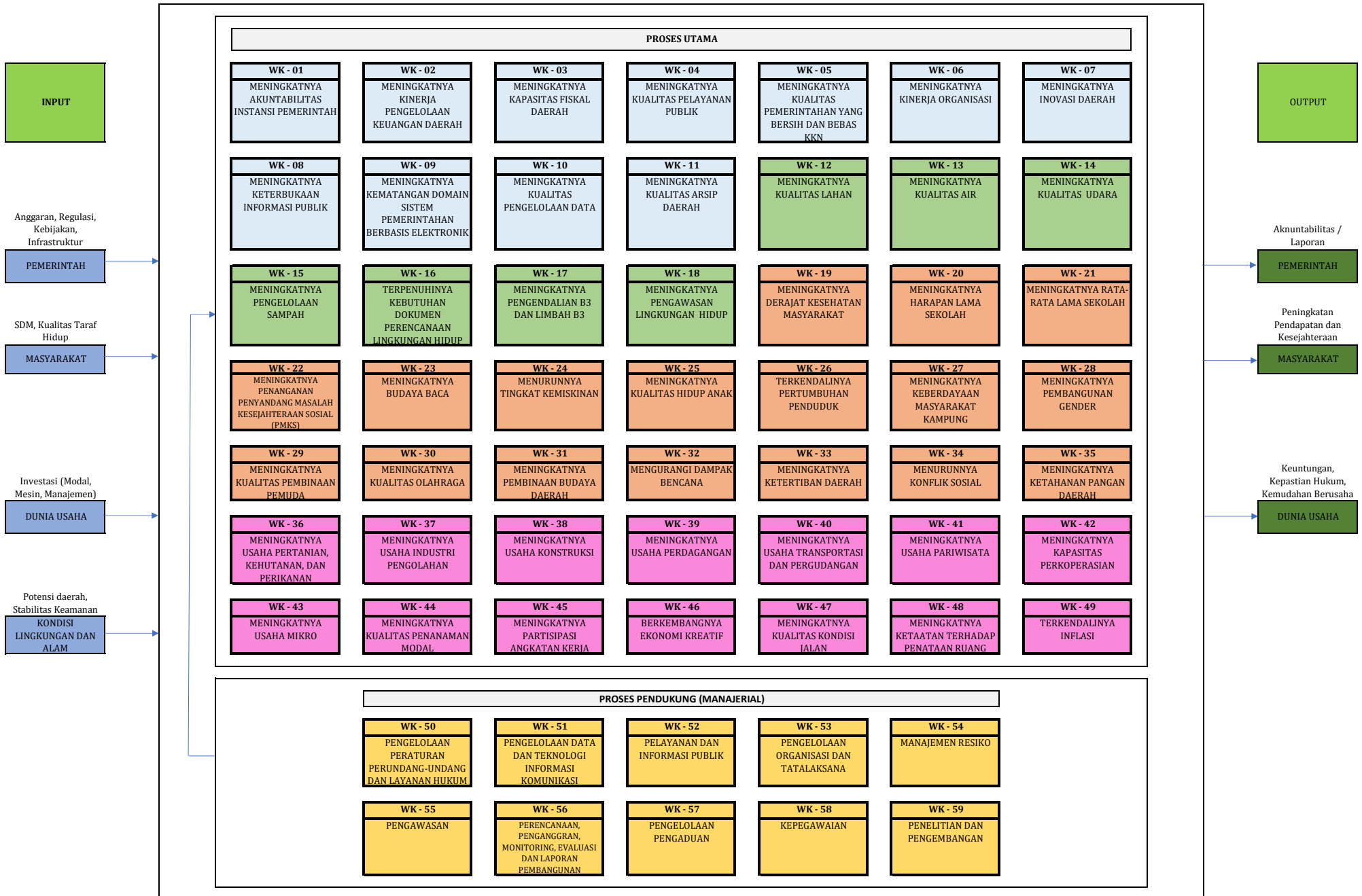
 BUPATI WAY KANAN,

ADIPATI SURYA

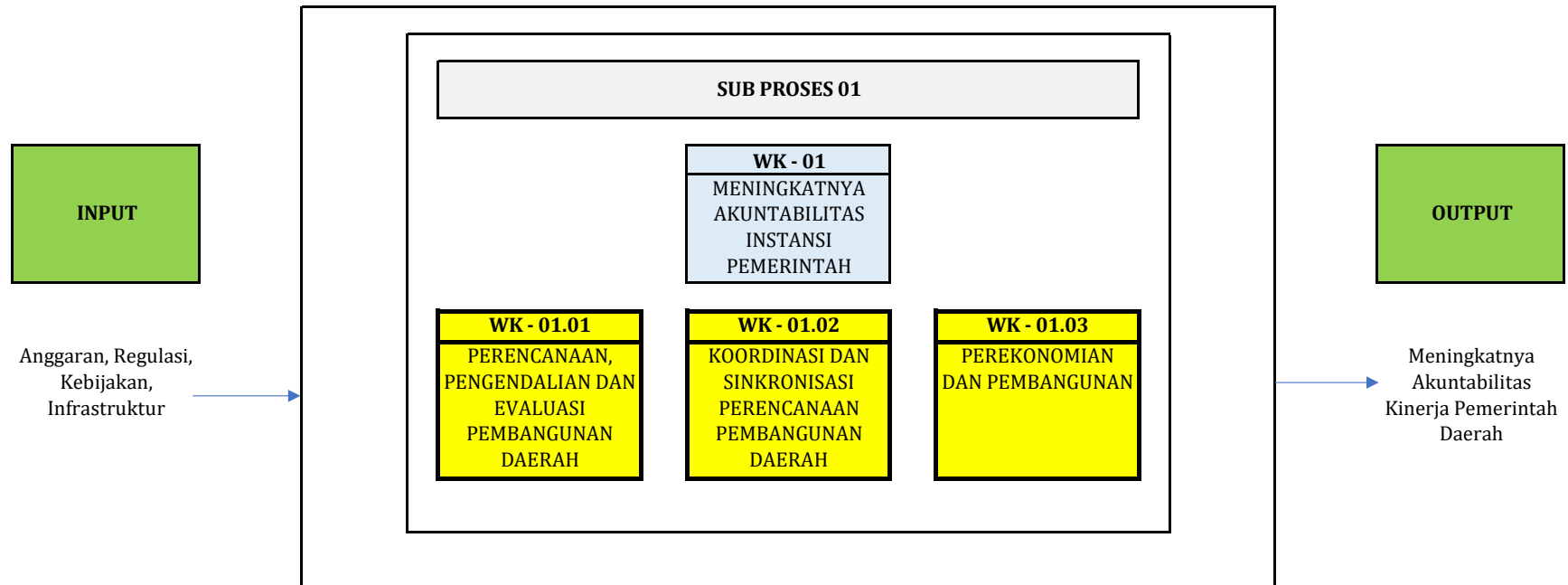
Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.
2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

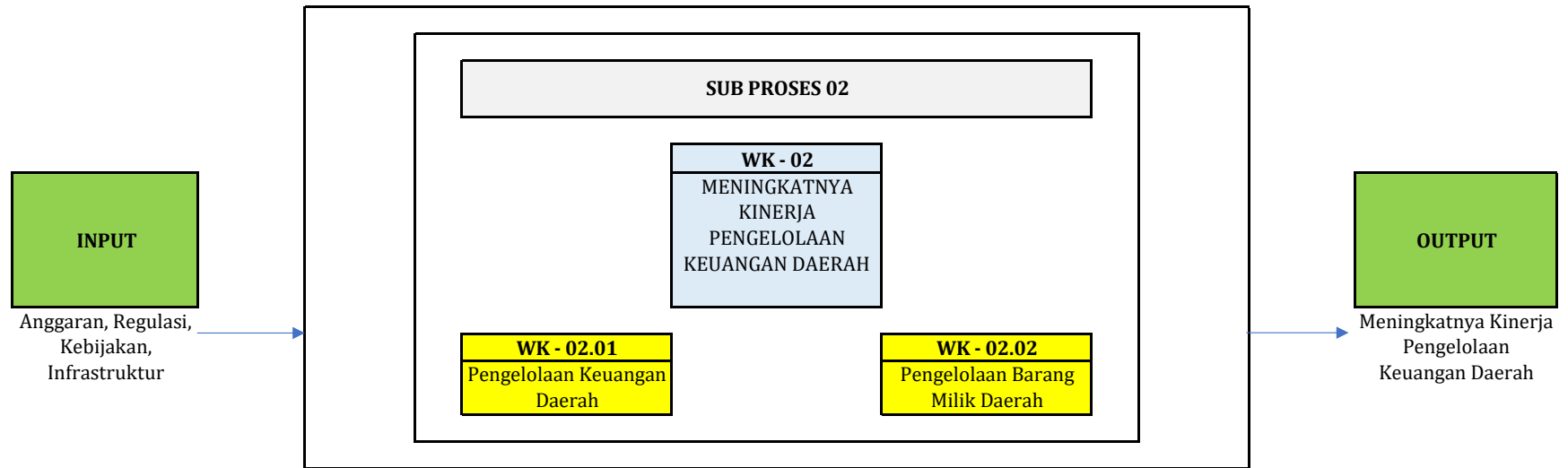
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN



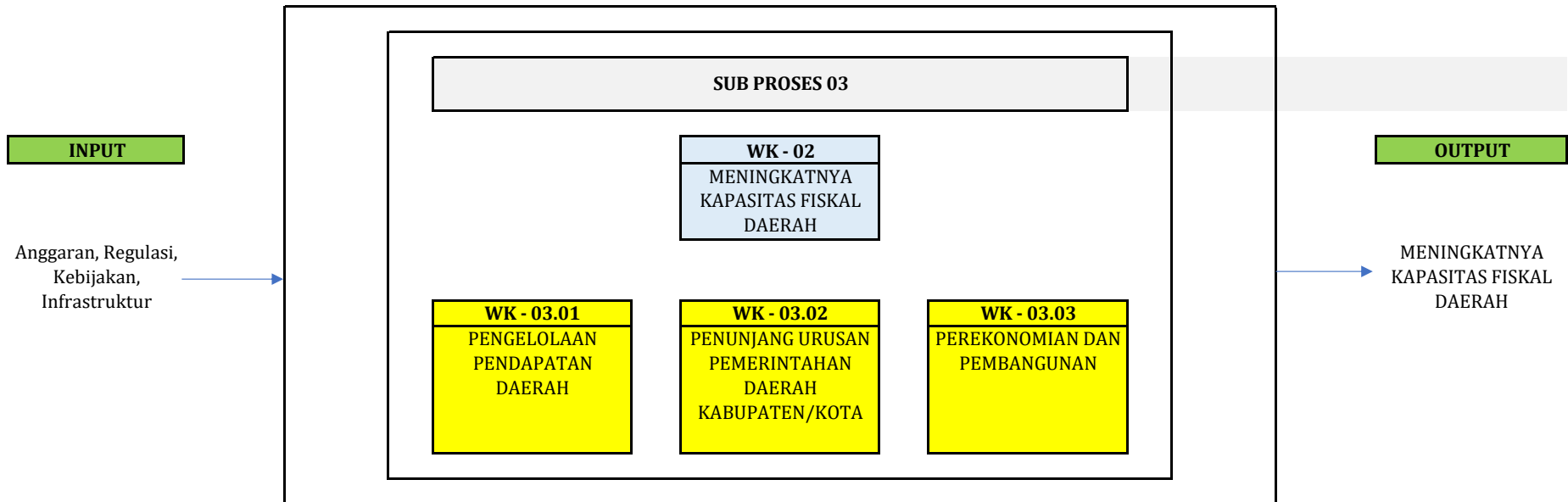
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



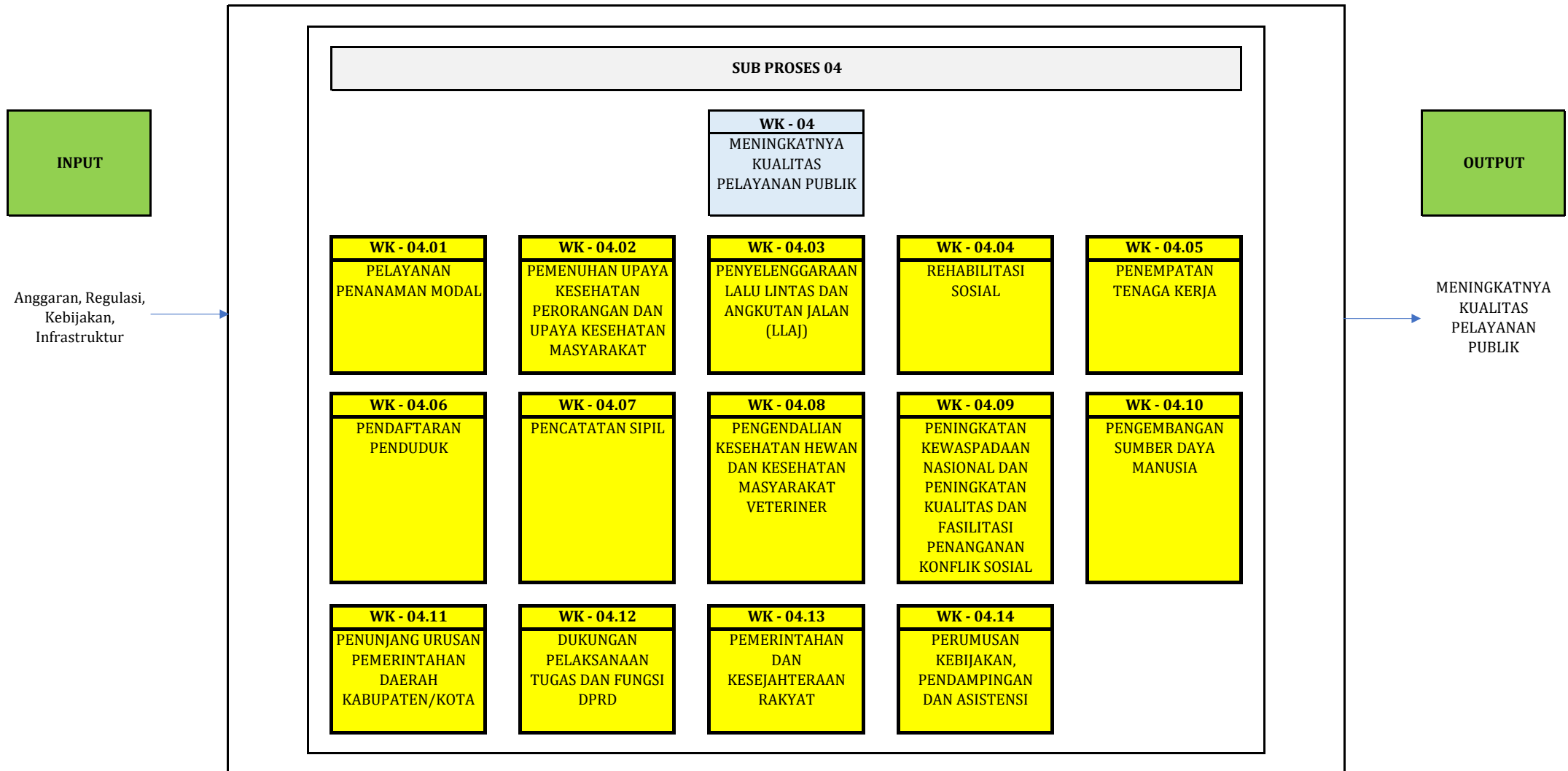
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



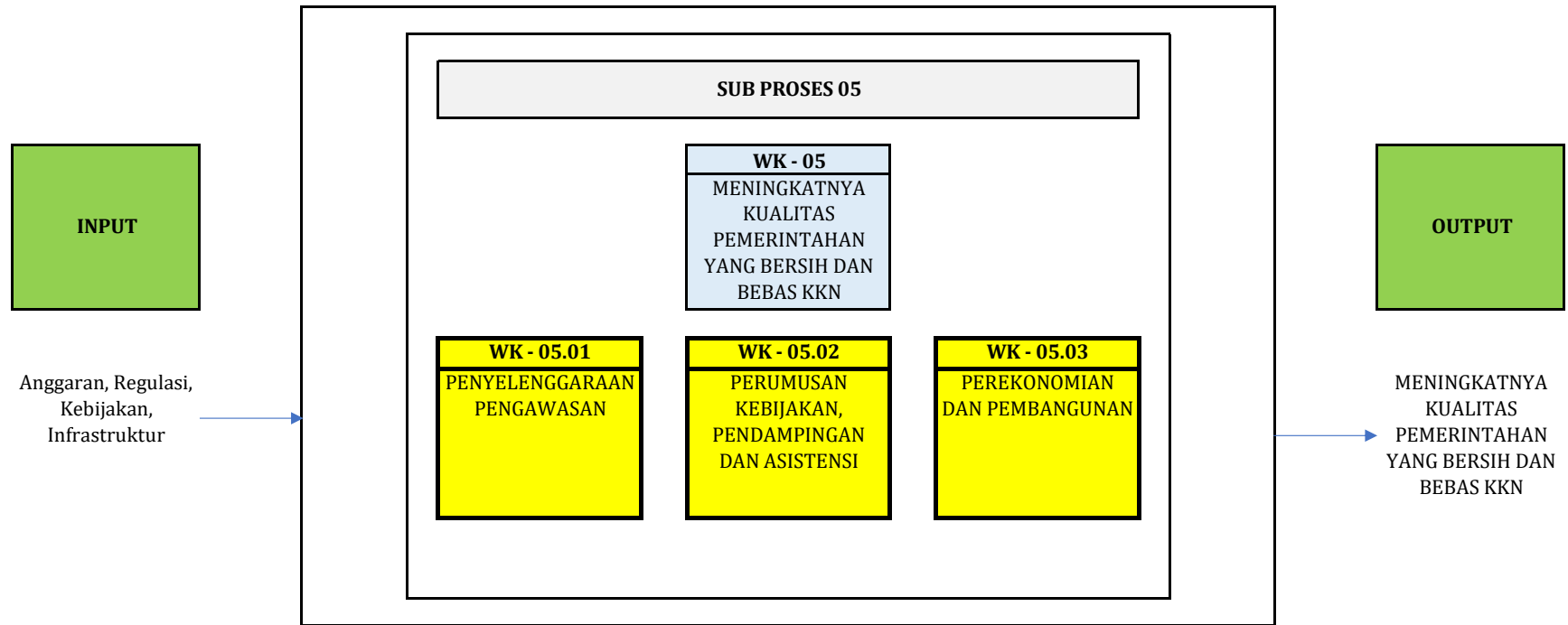
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



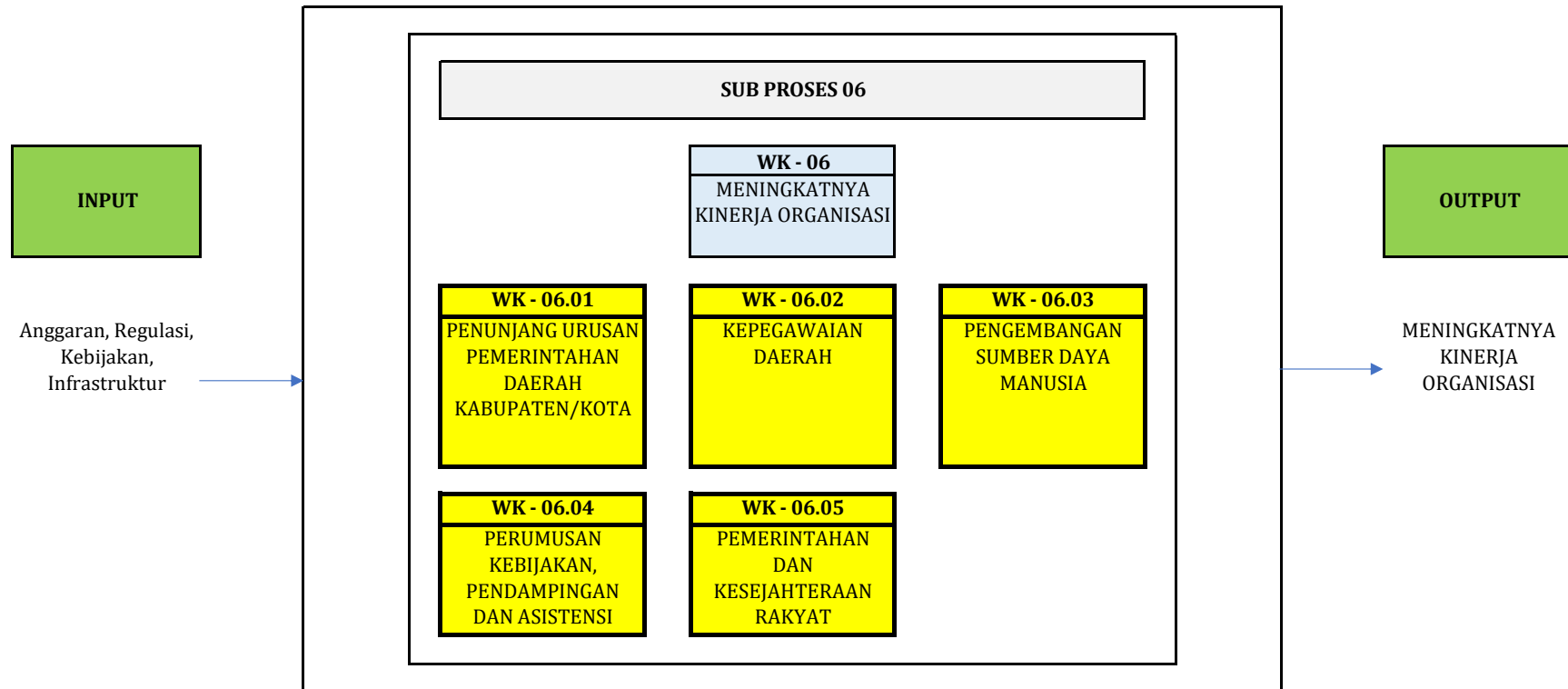
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



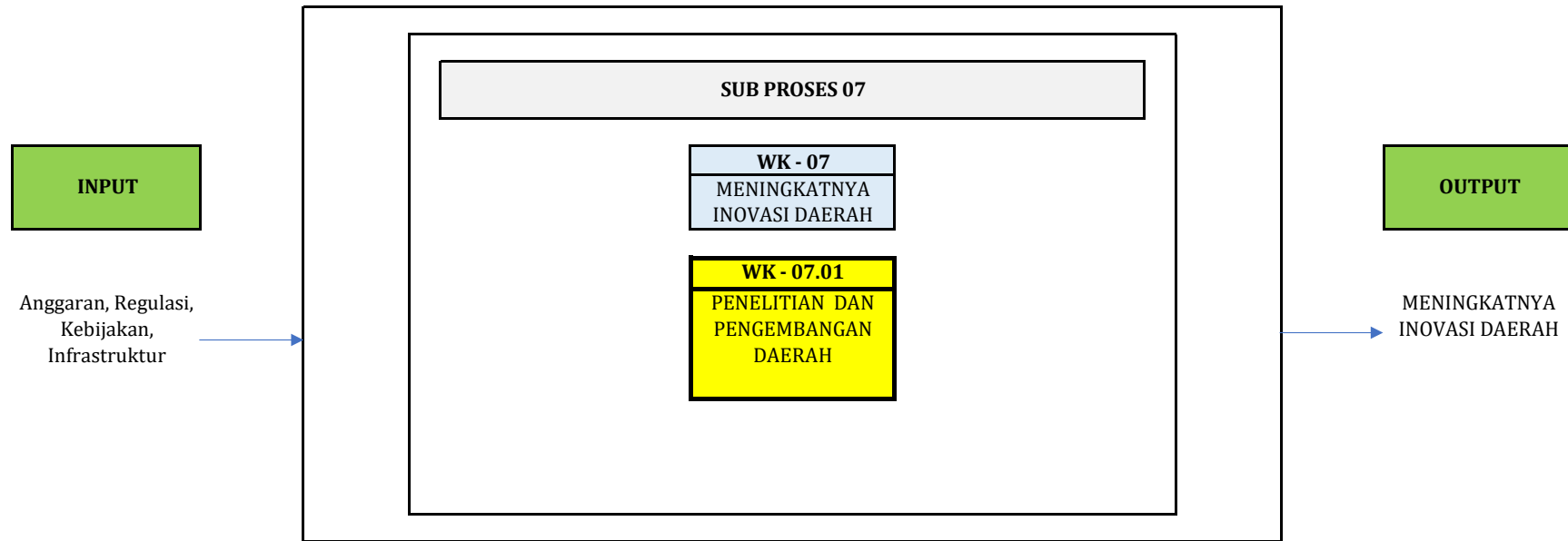
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



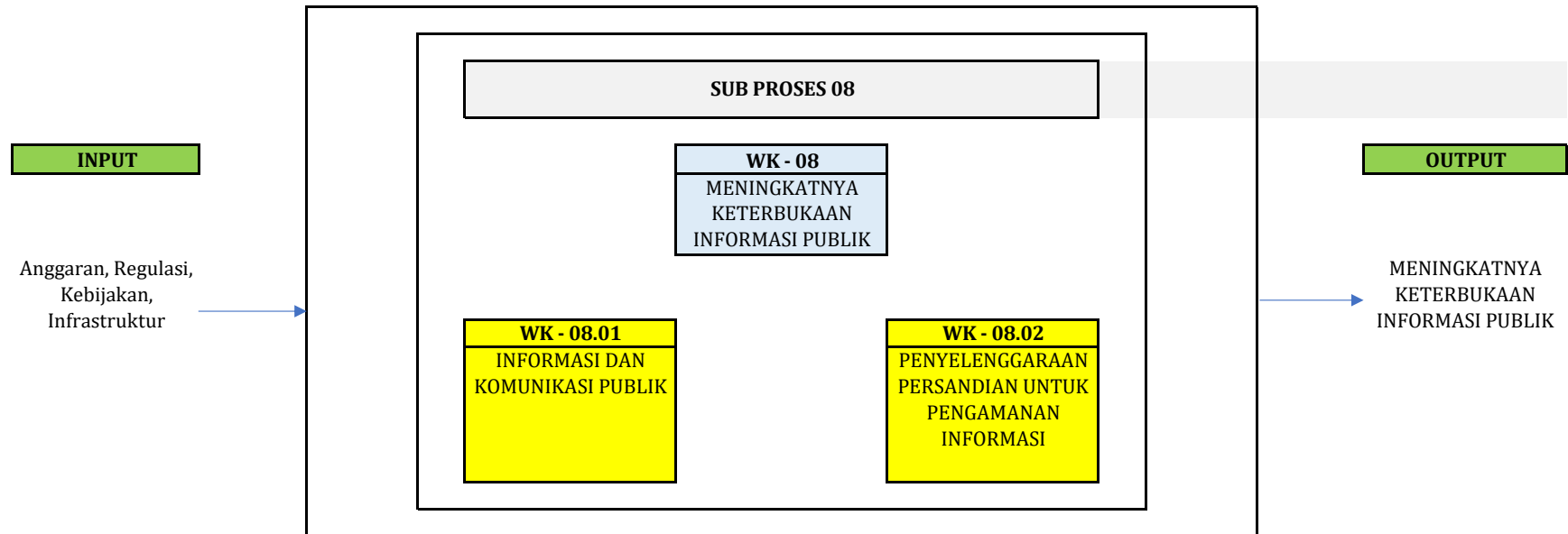
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



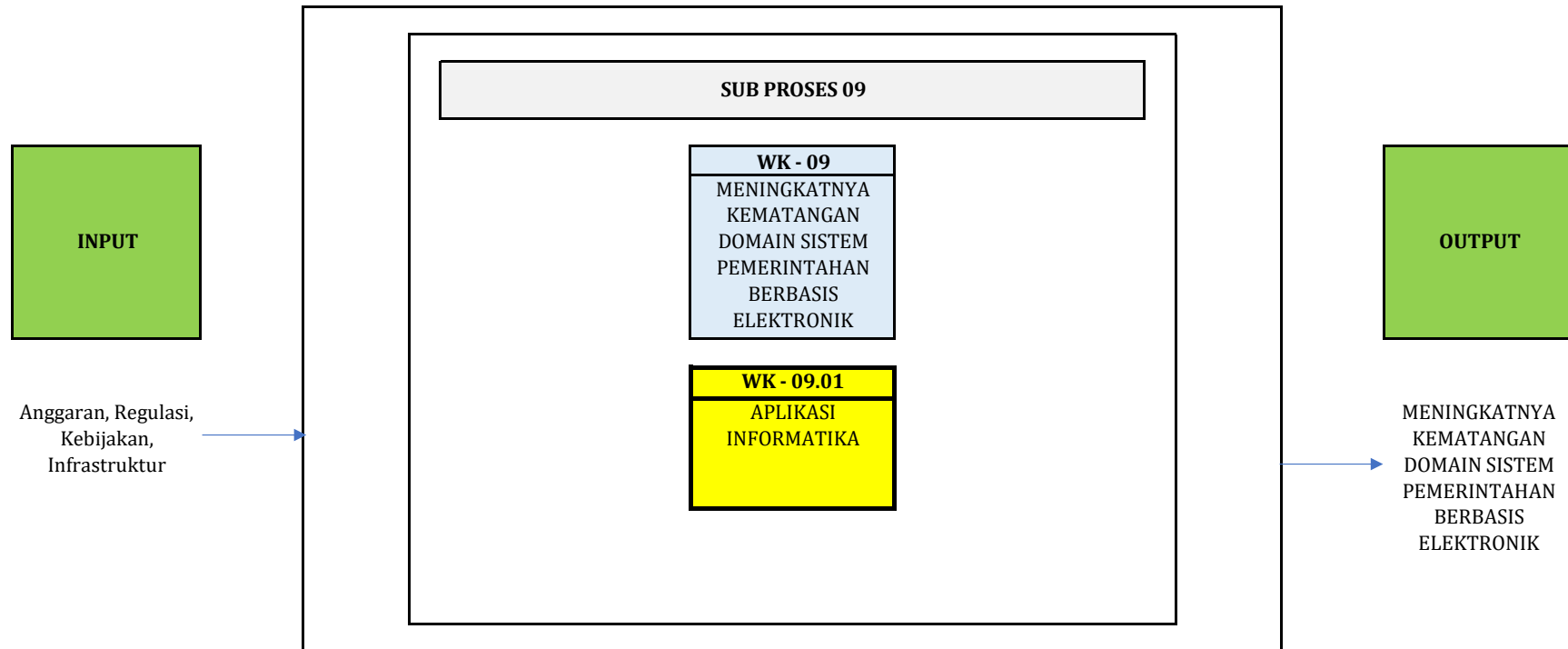
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



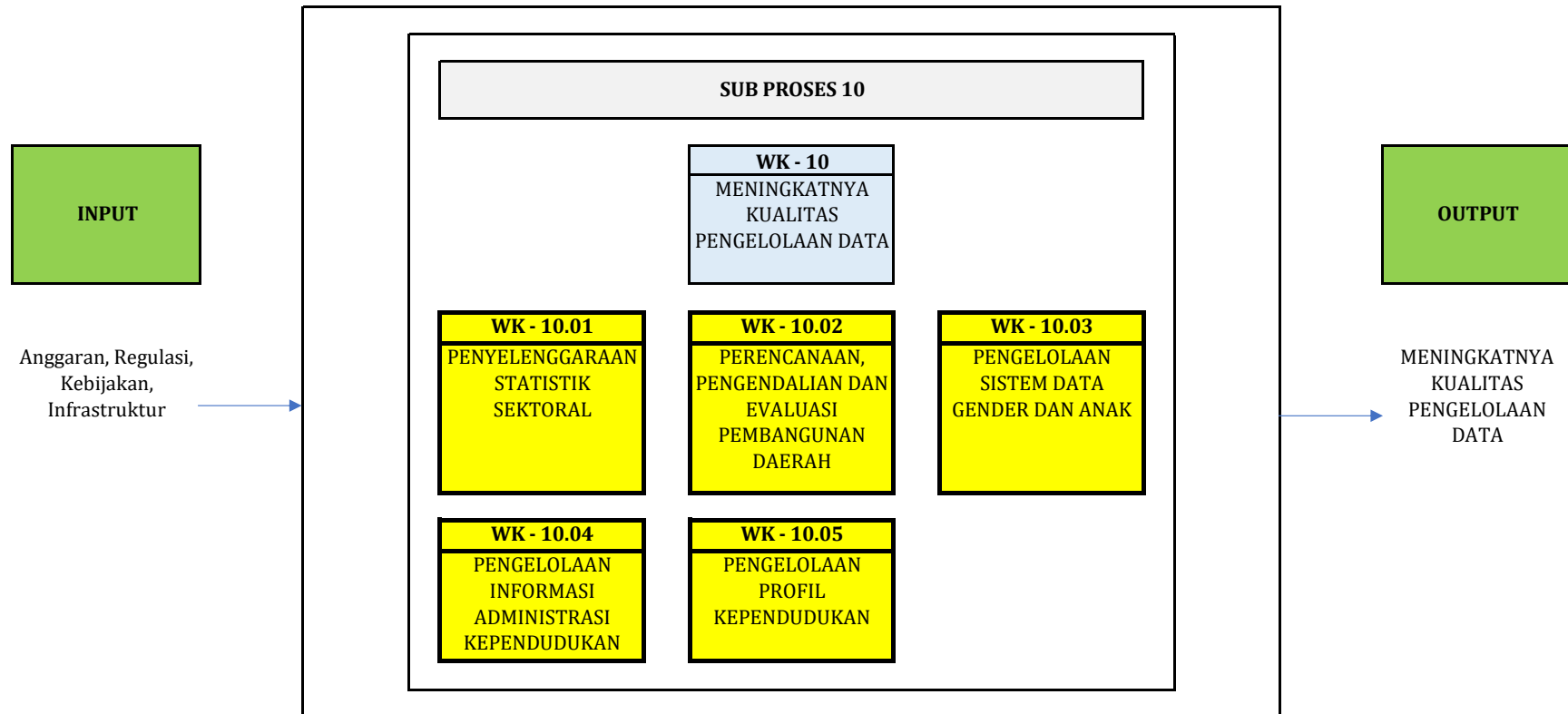
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



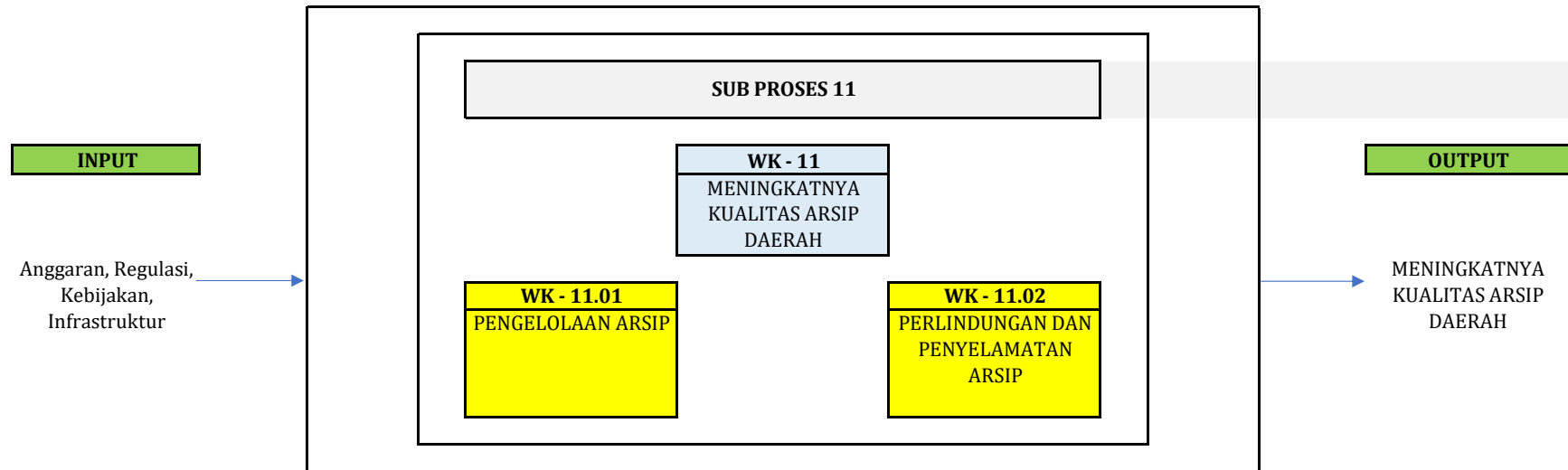
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



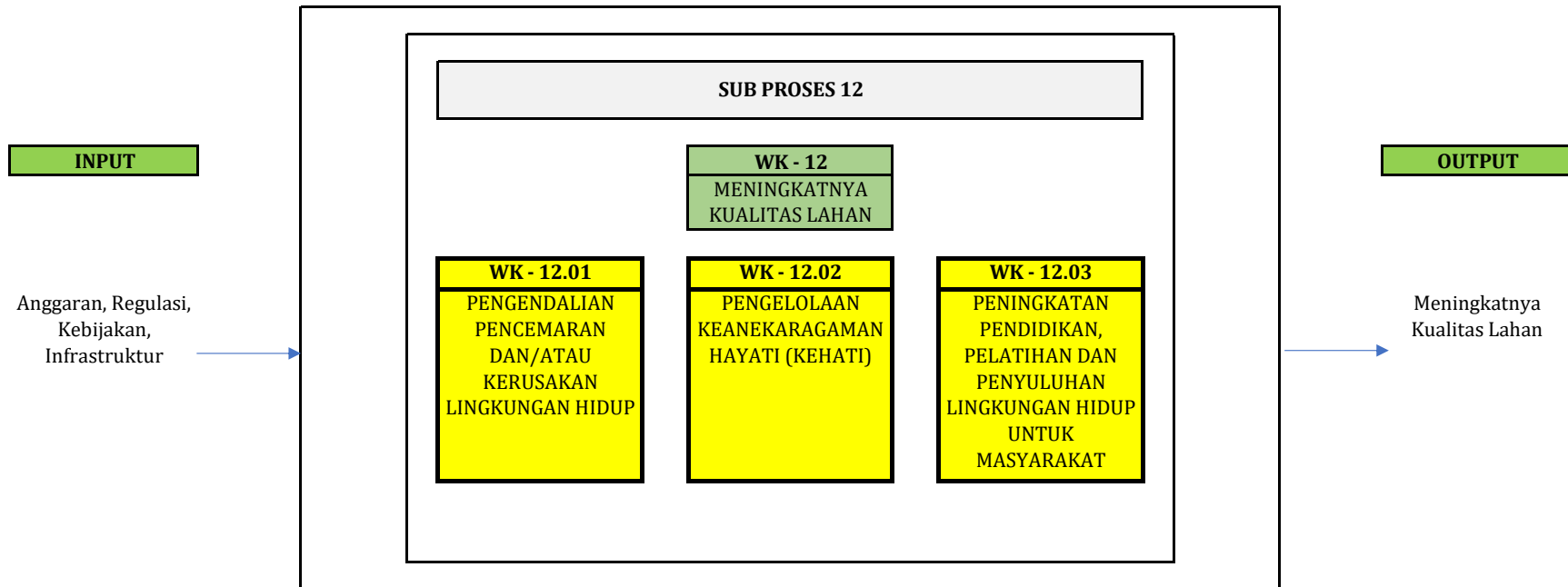
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



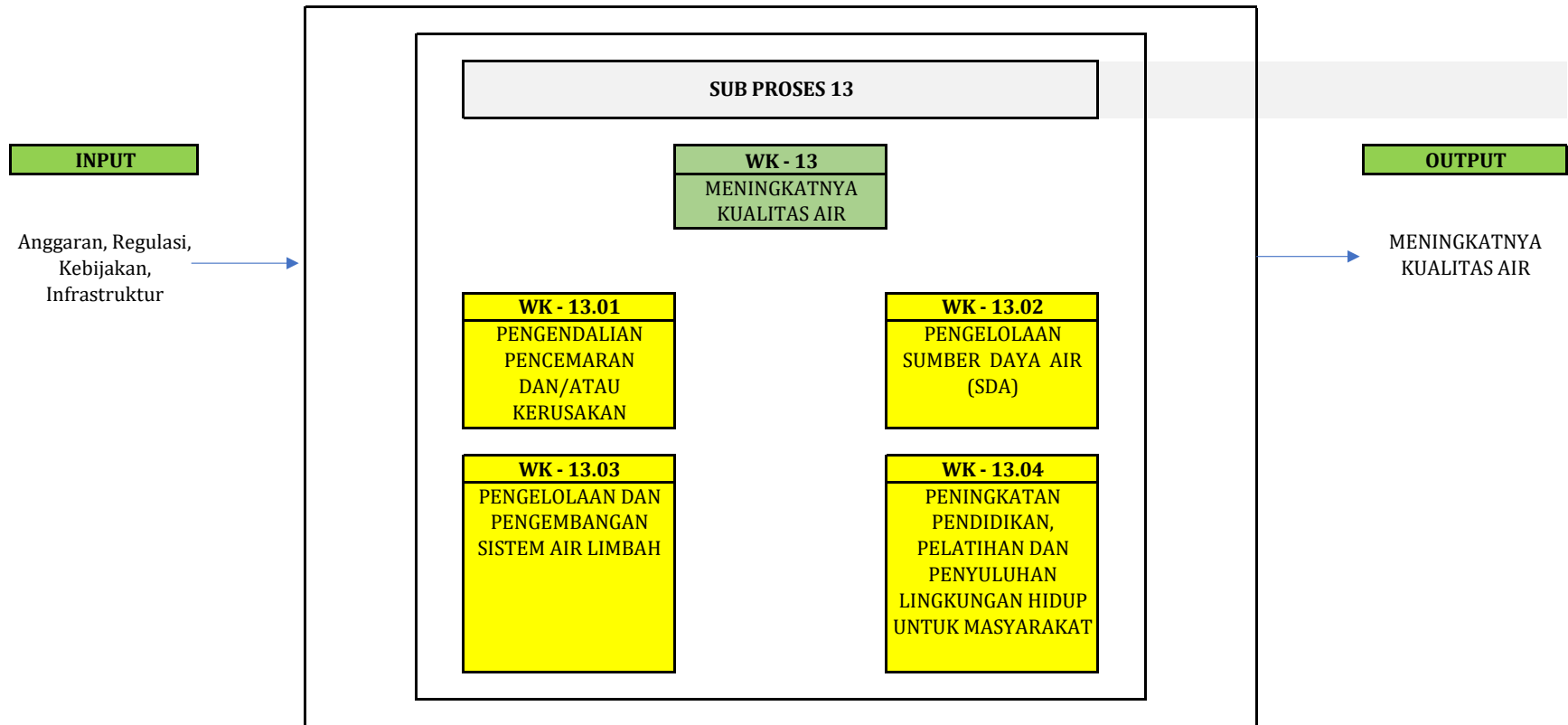
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



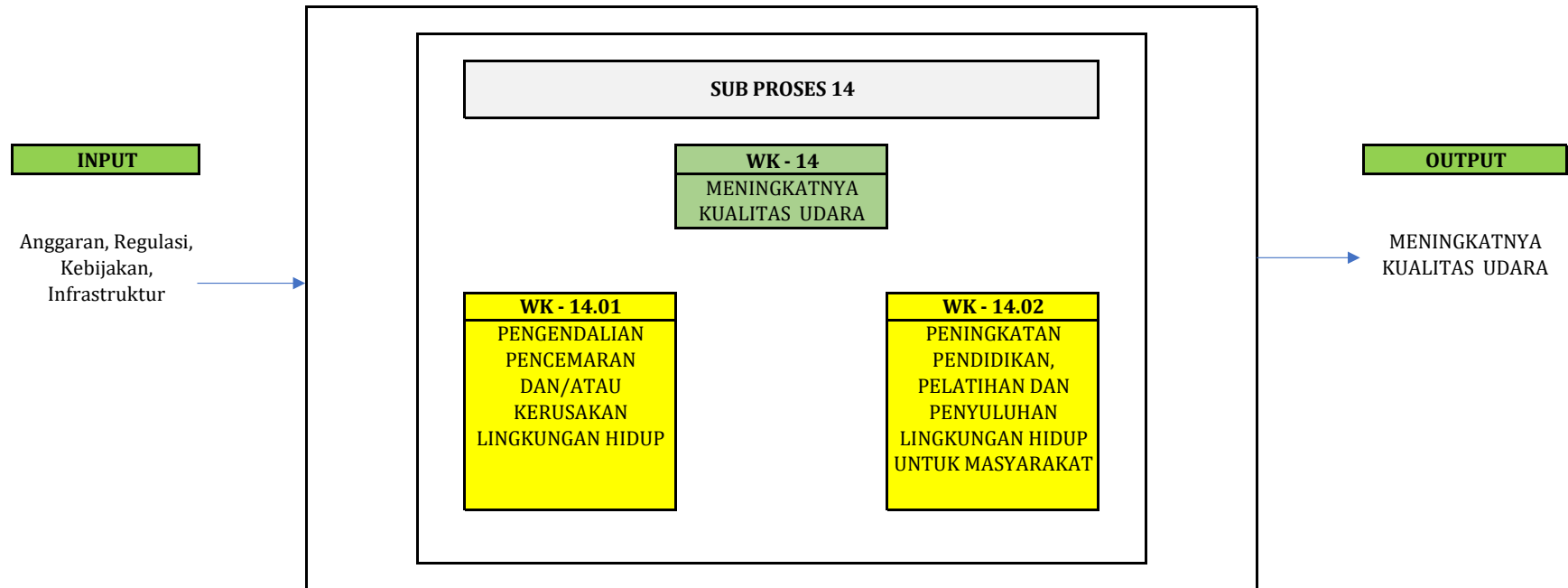
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



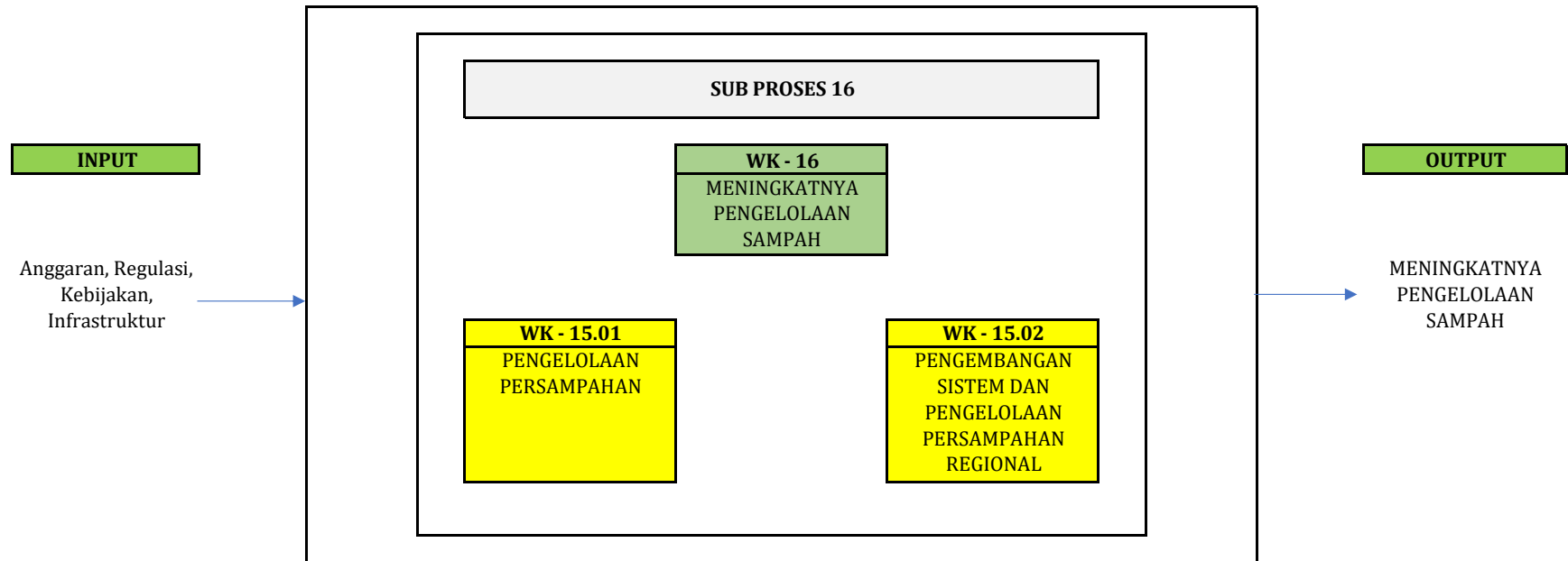
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



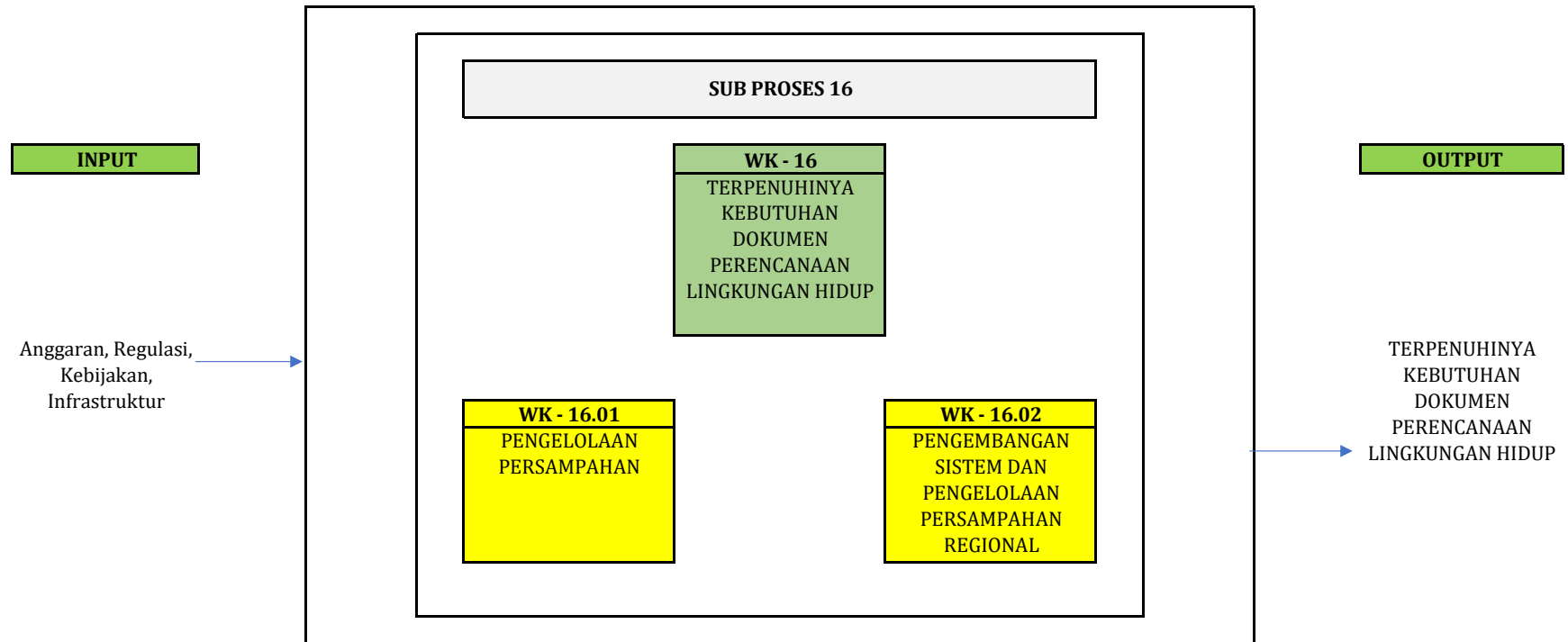
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



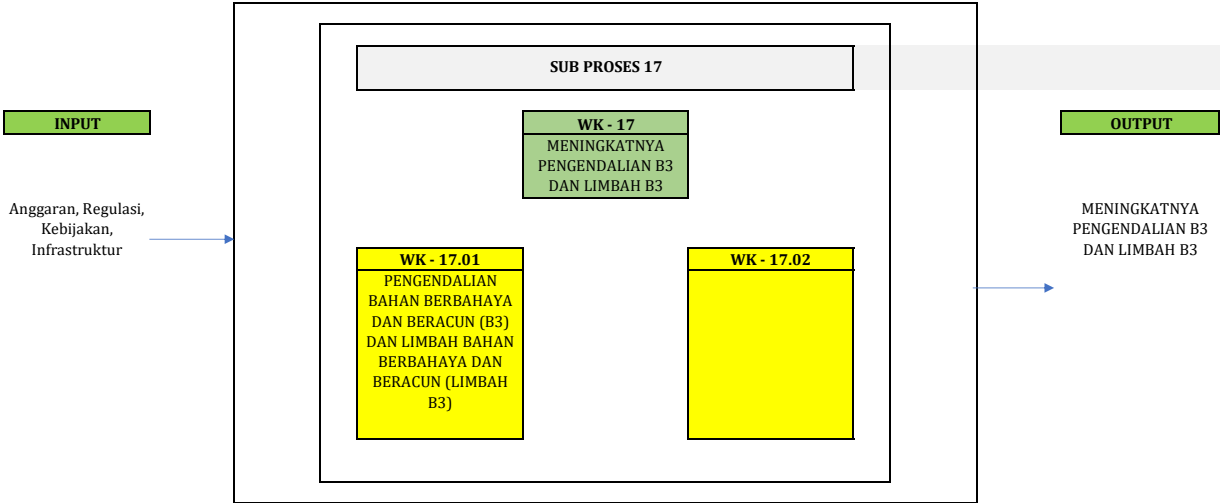
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



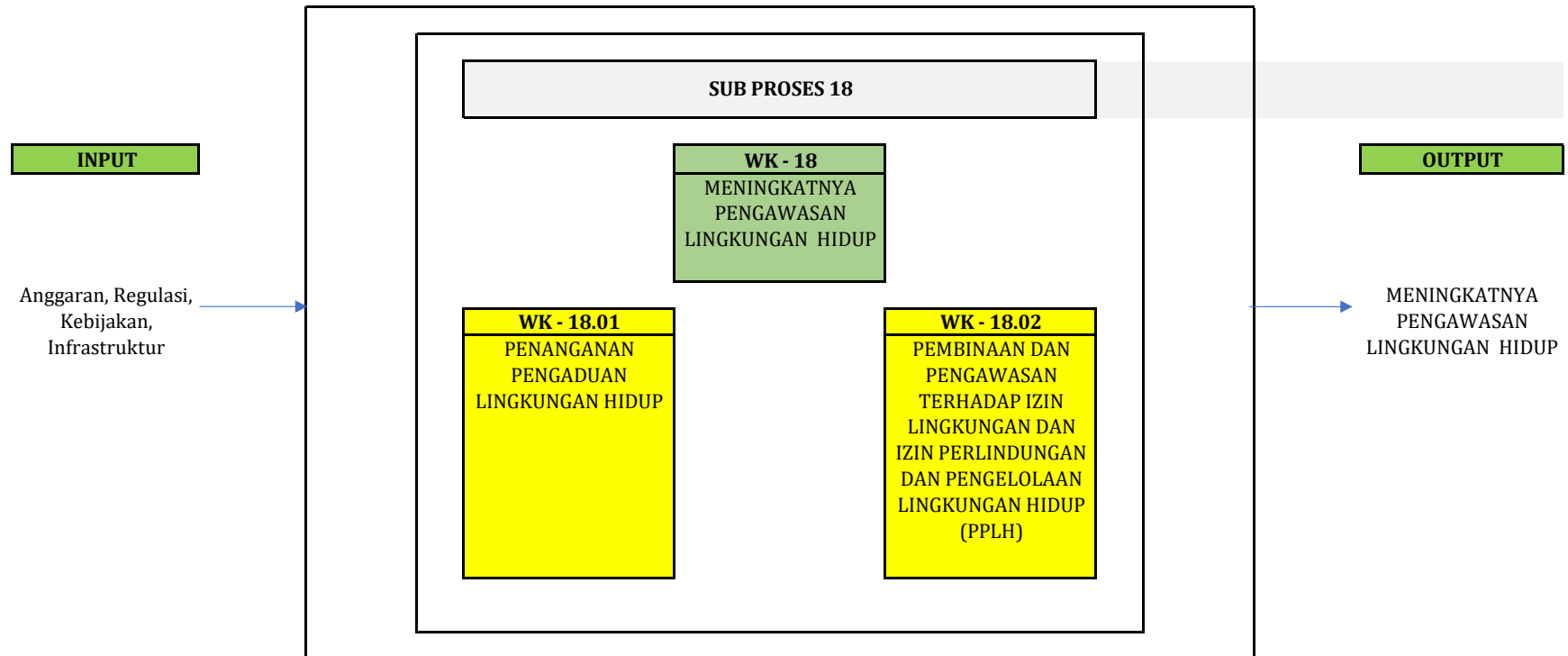
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



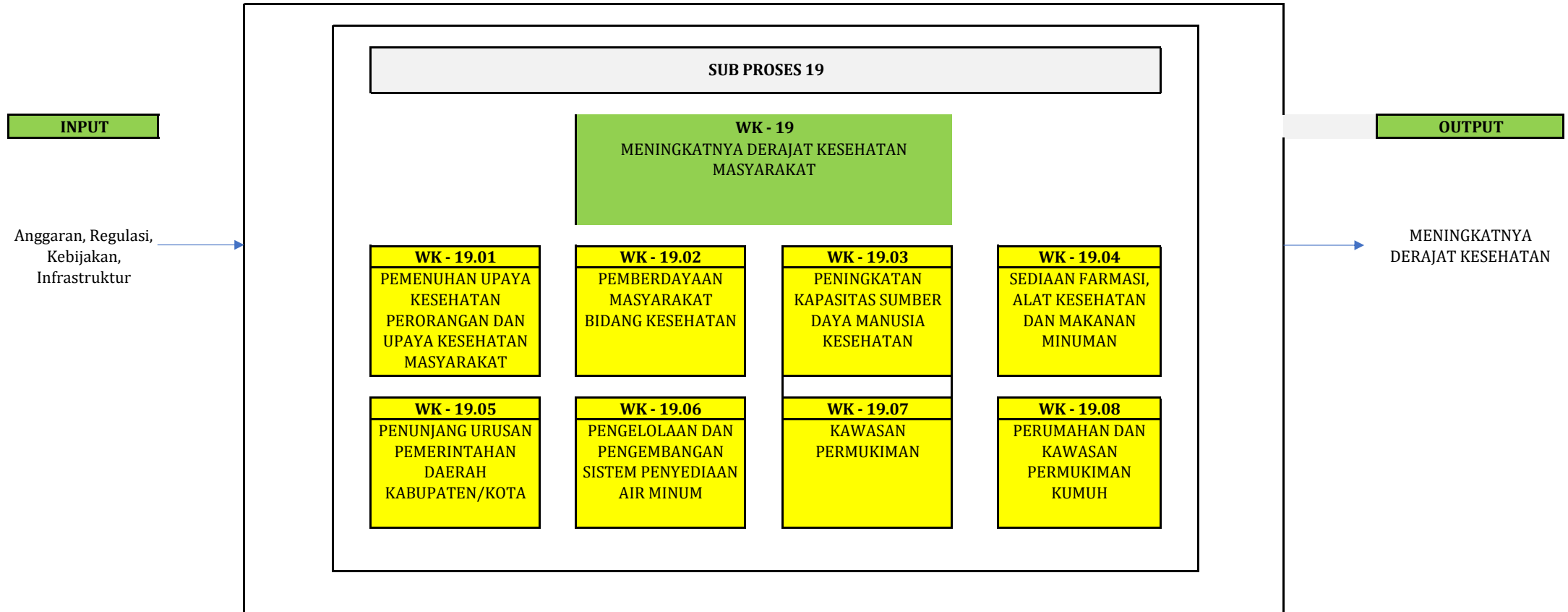
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



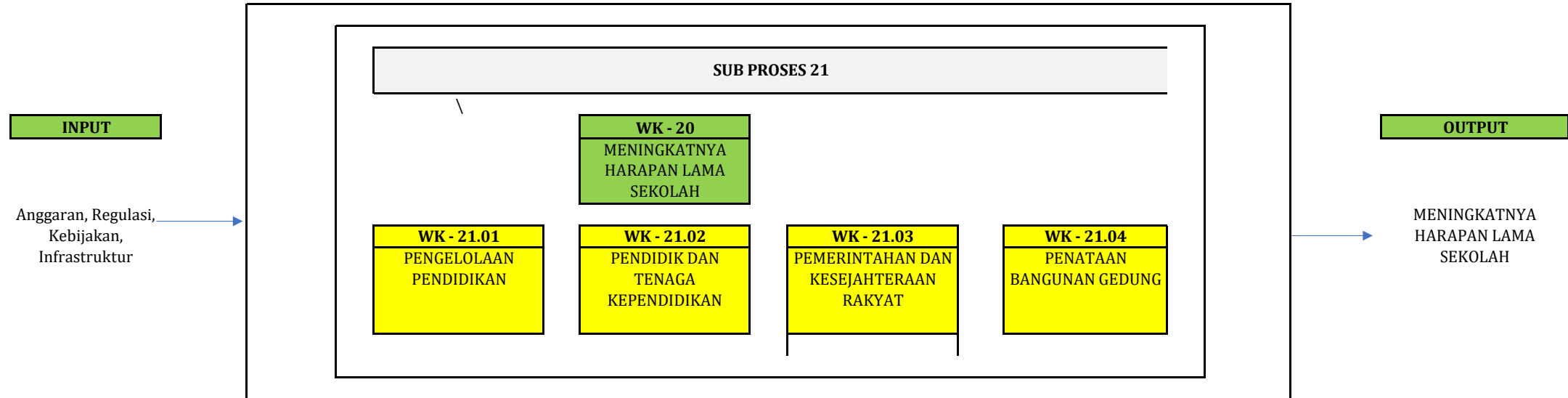
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



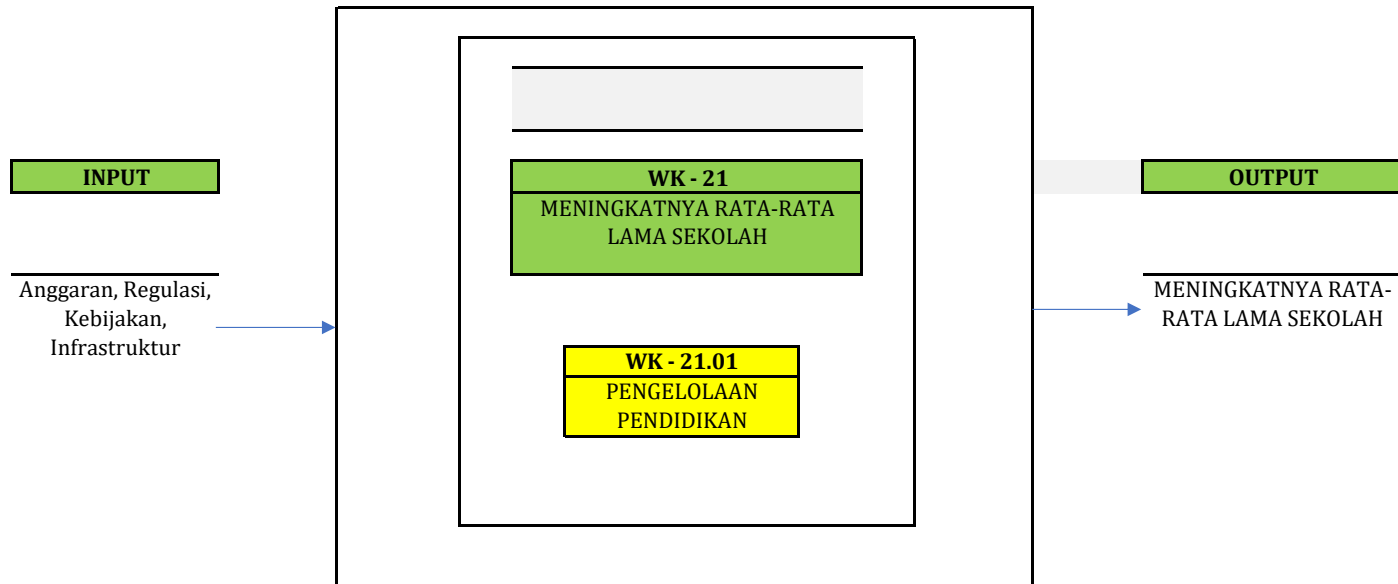
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



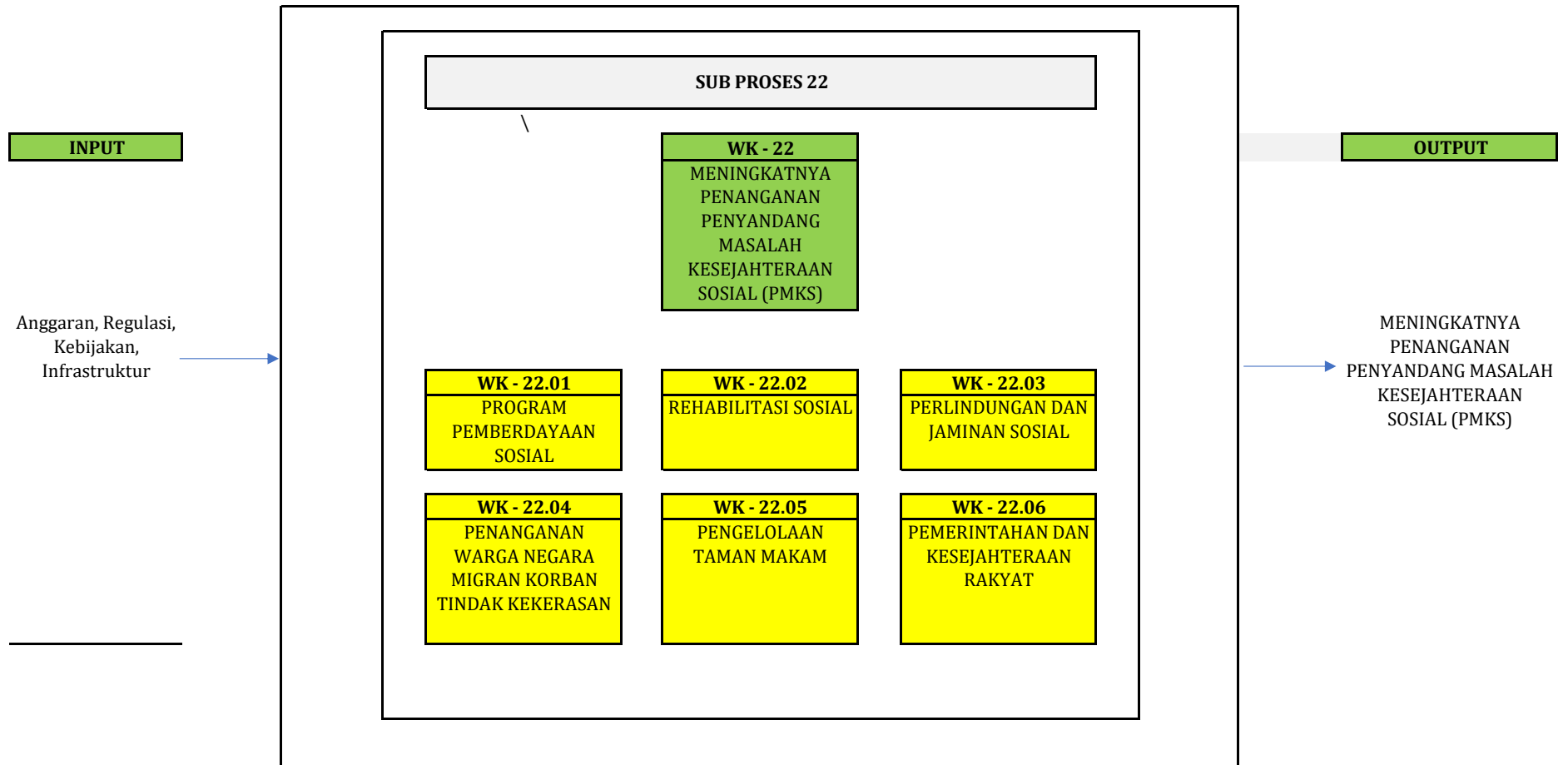
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



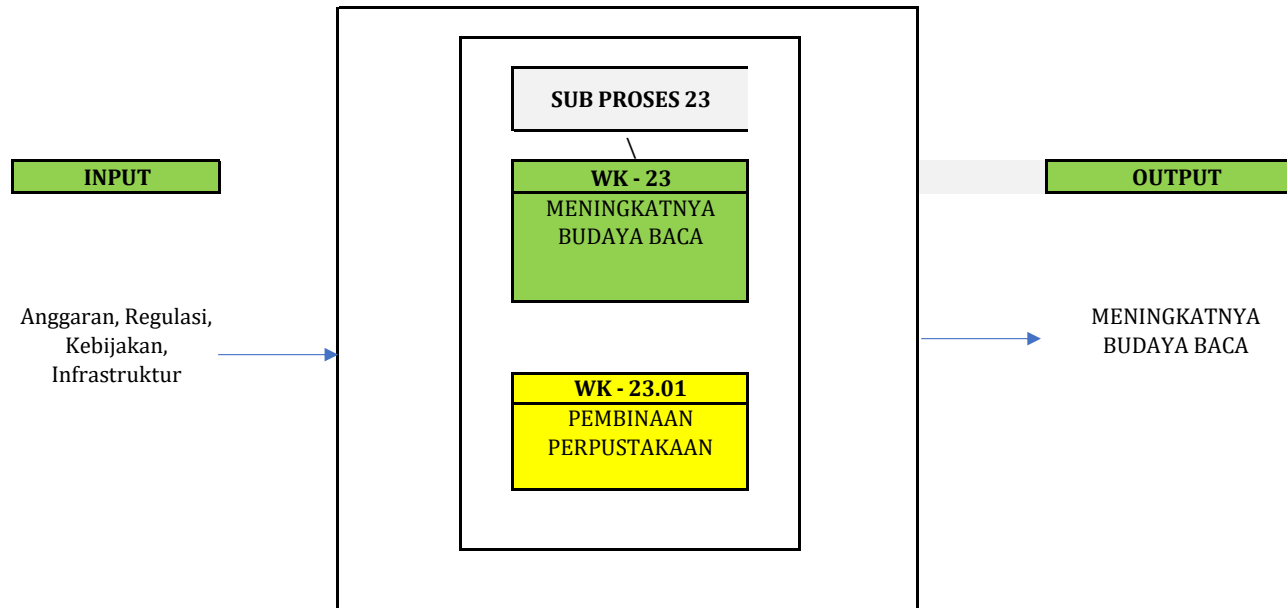
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



PETA SUB PROSES TUJUAN 3



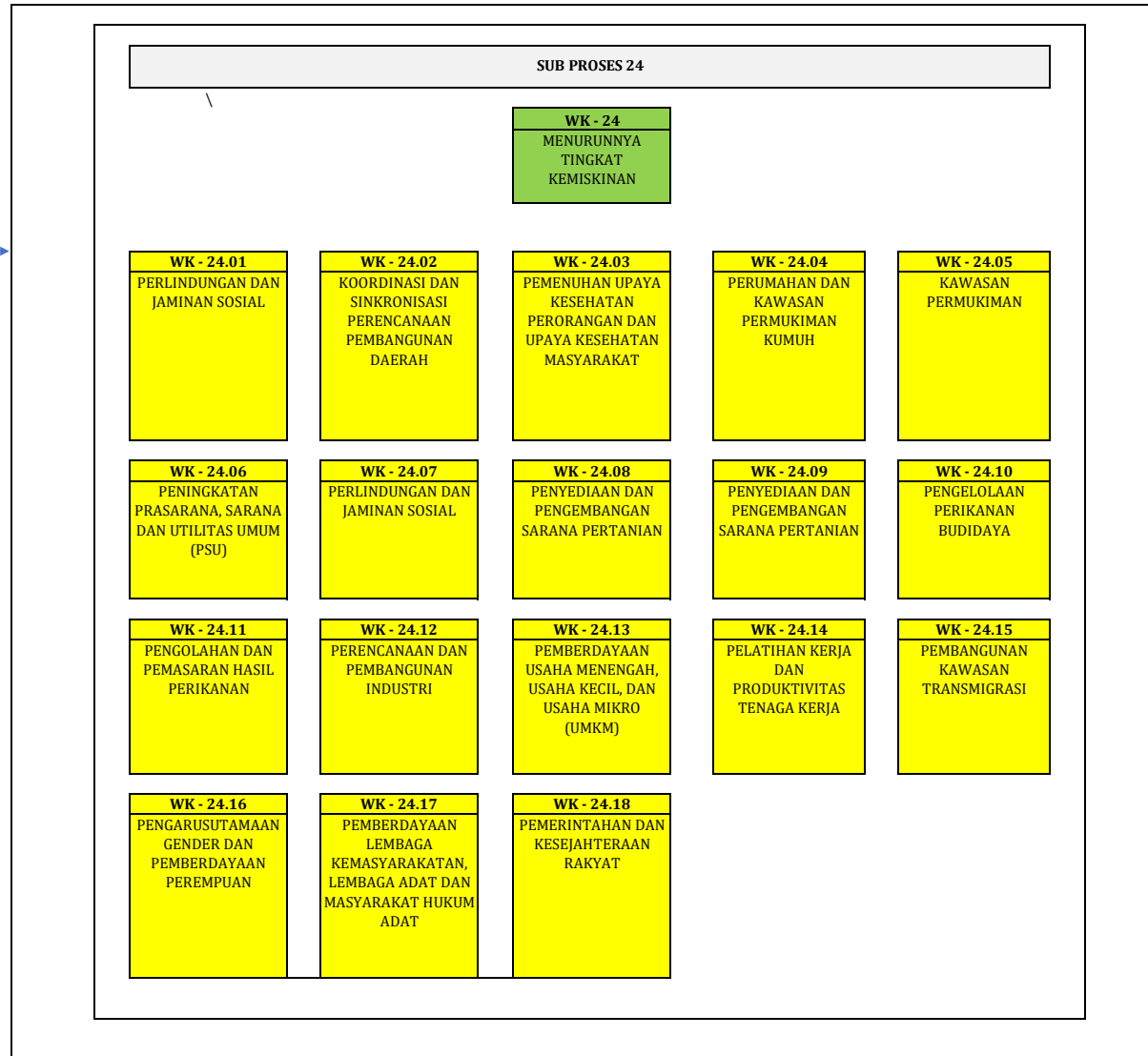
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

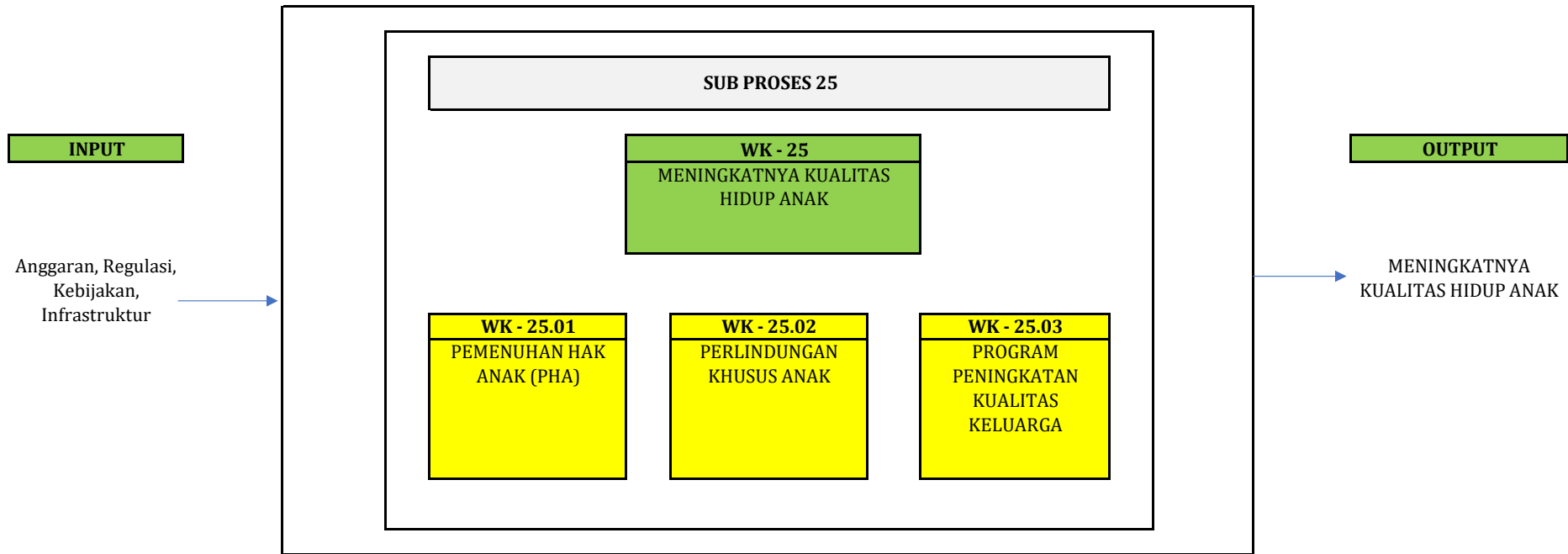
Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur



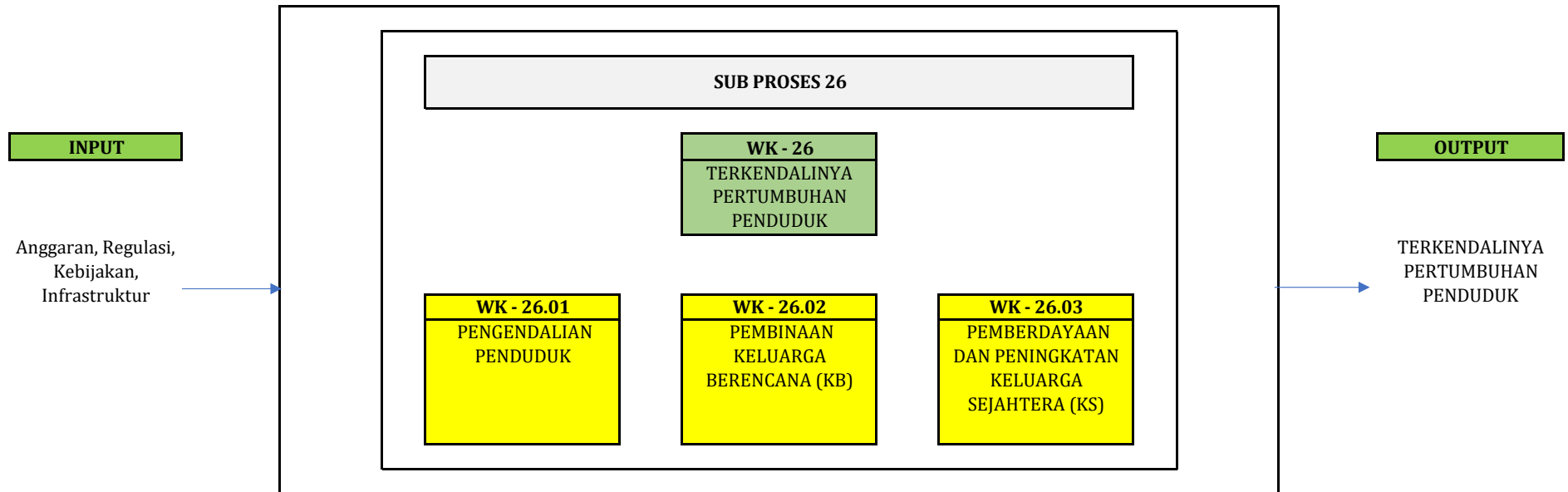
OUTPUT

MENURUNNYA TINGKAT
KEMISKINAN

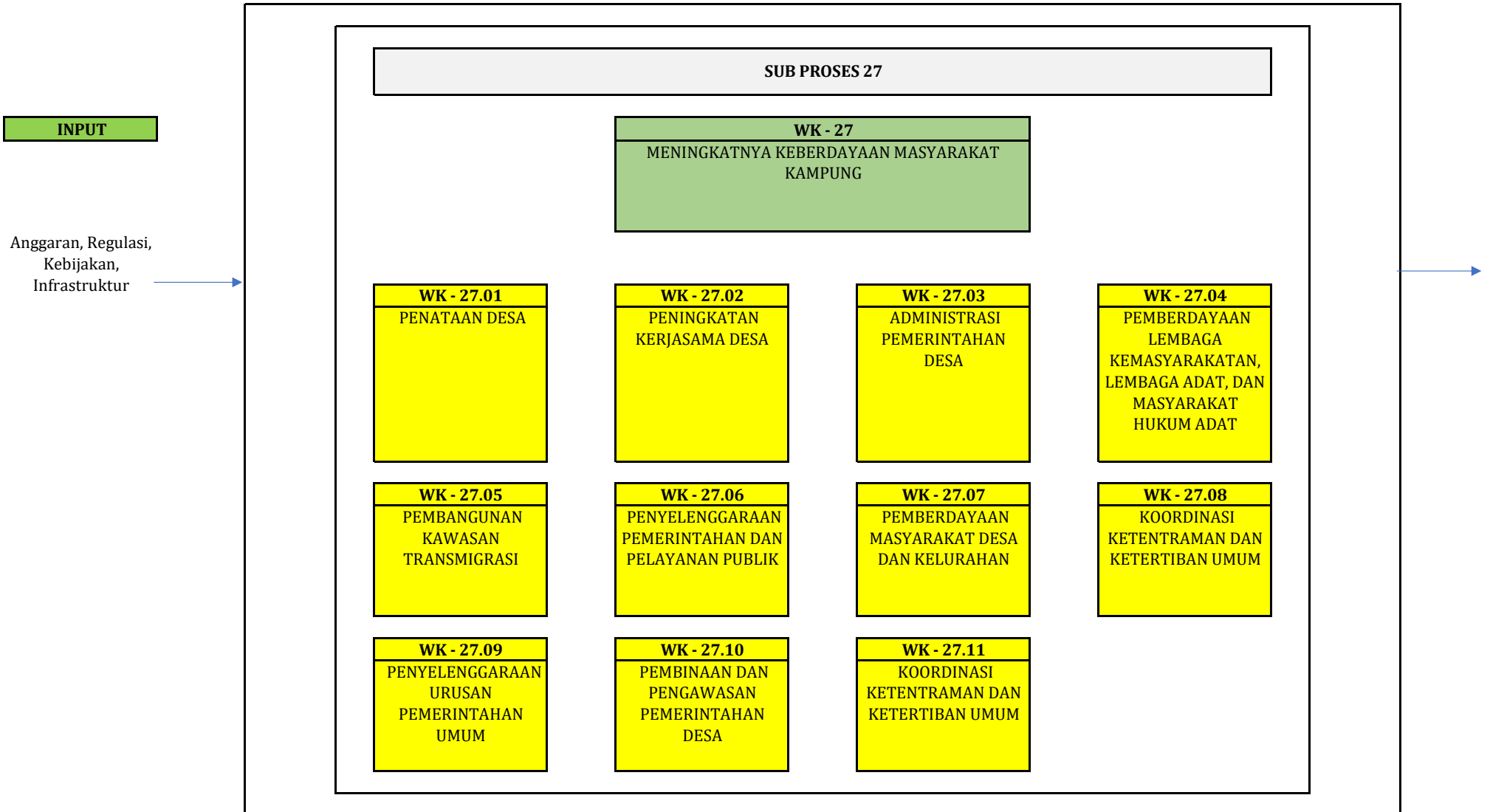
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



PETA SUB PROSES TUJUAN 3



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

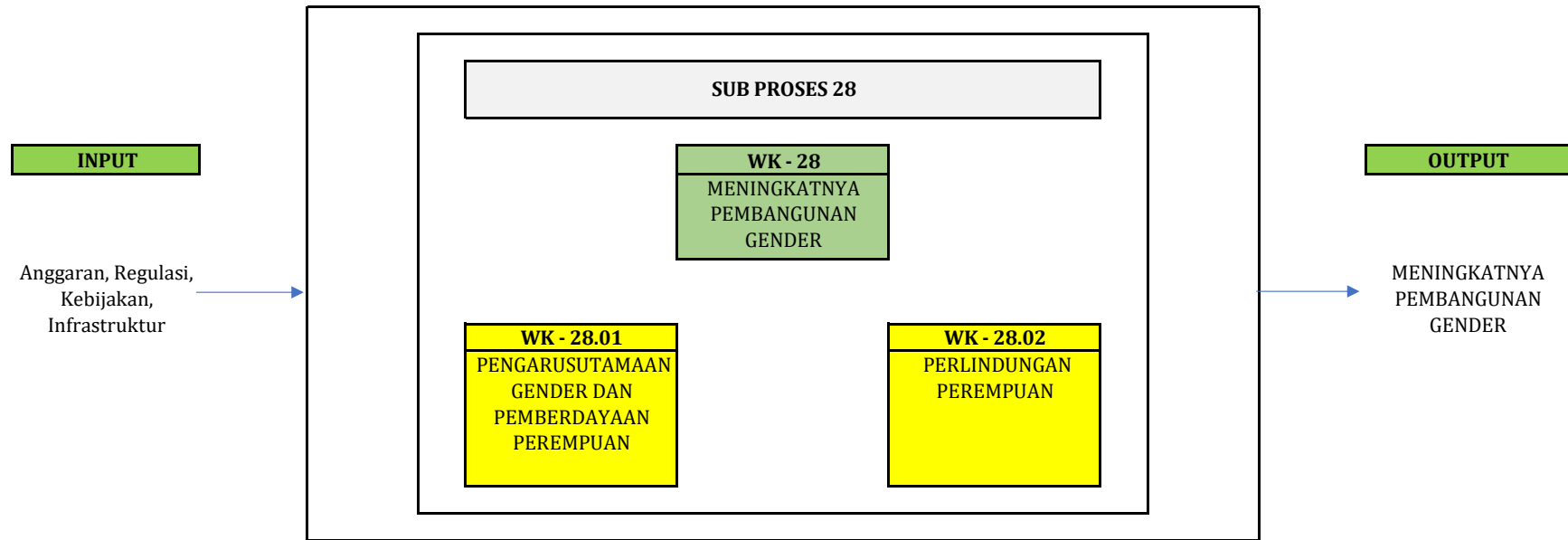




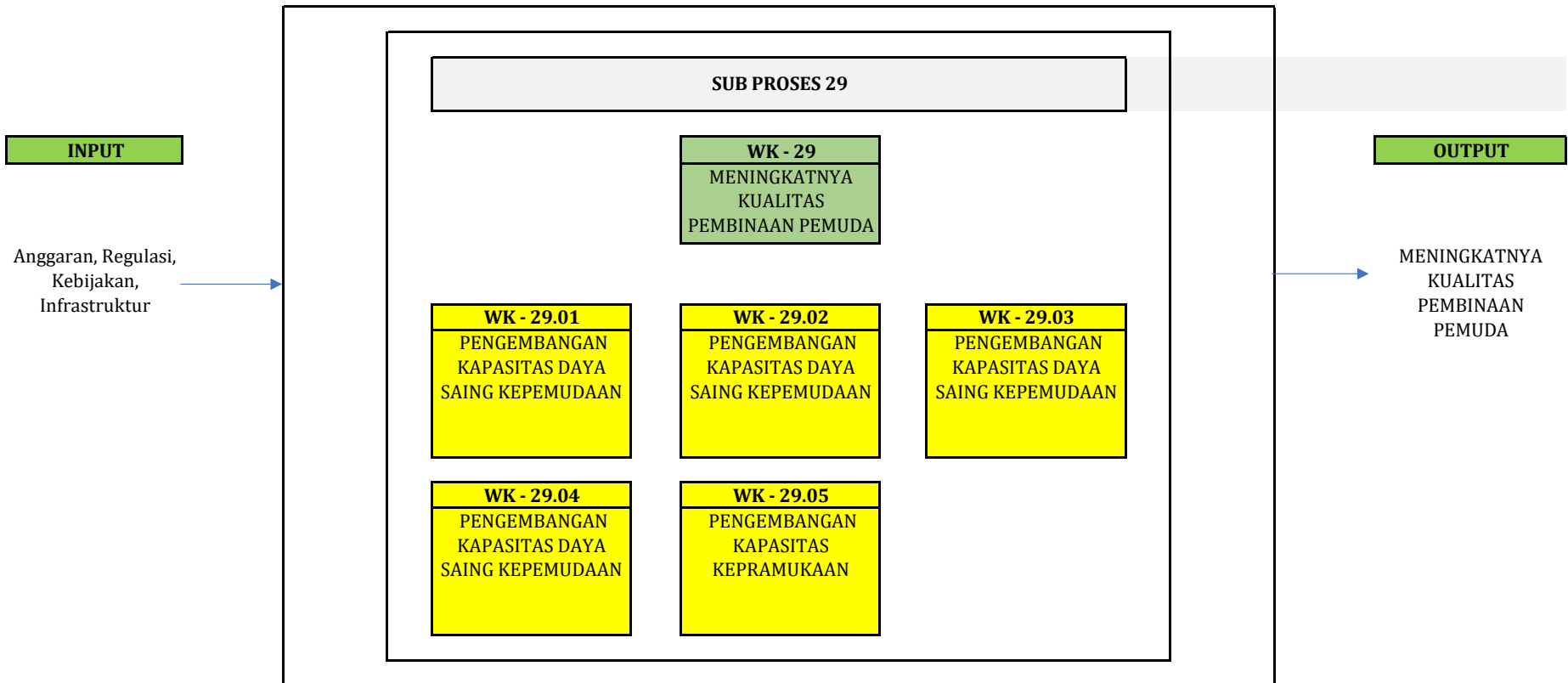
OUTPUT

MENINGKATNYA
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
KAMPUNG

PETA SUB PROSES TUJUAN 3



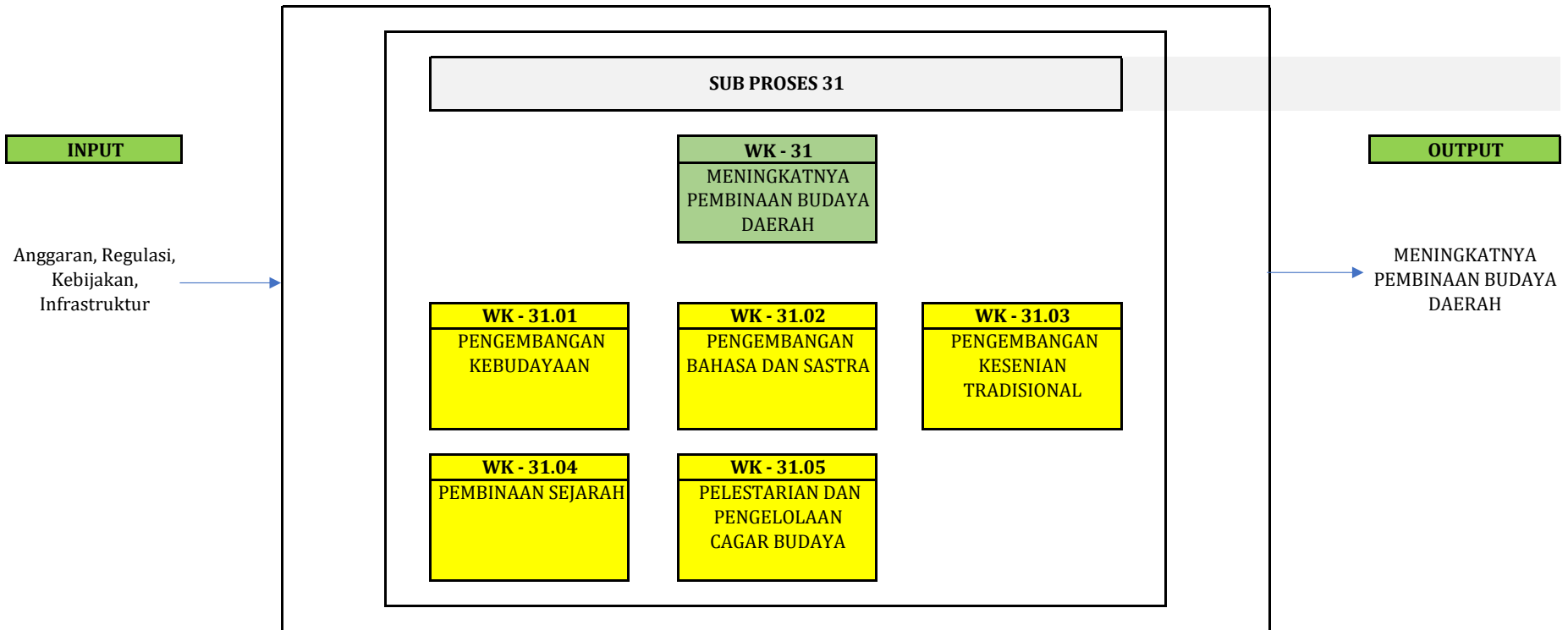
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



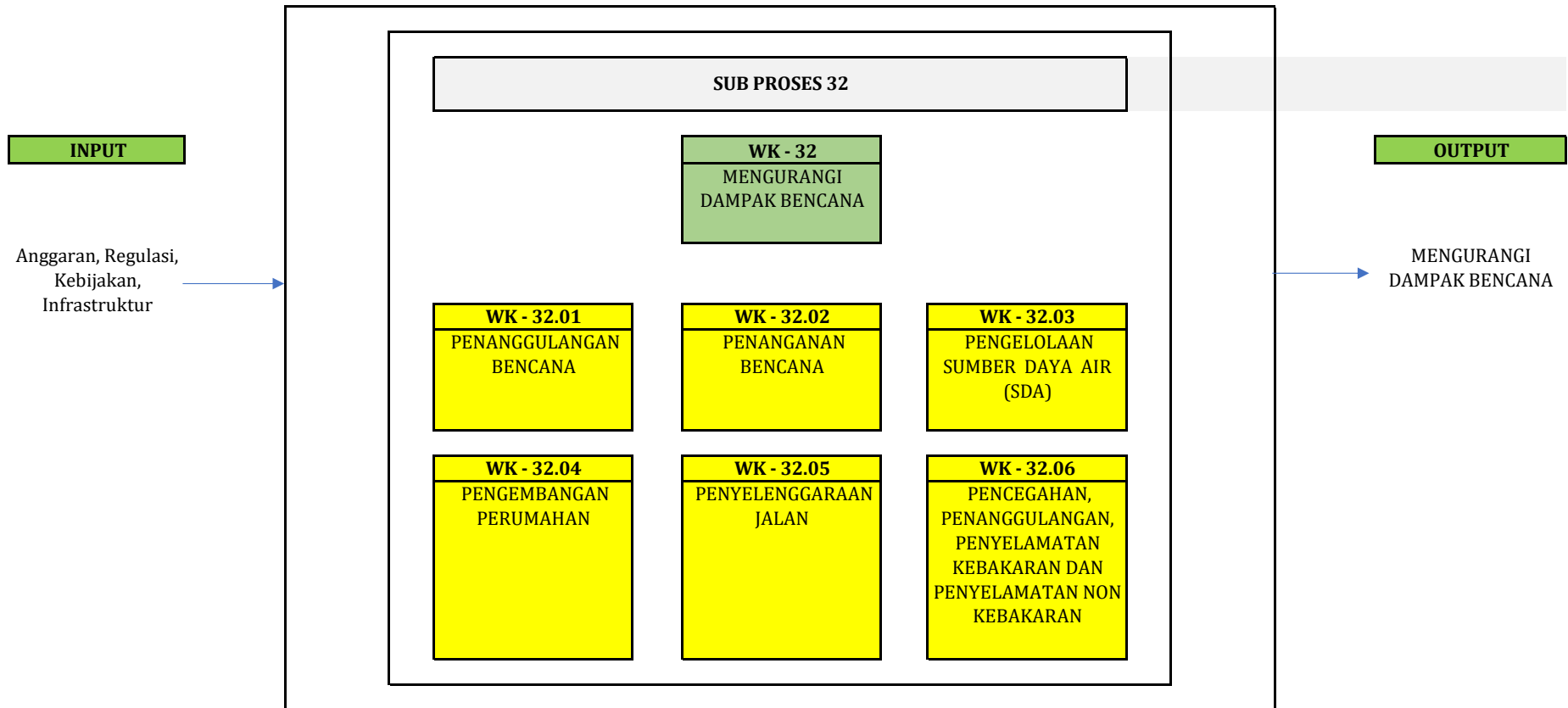
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



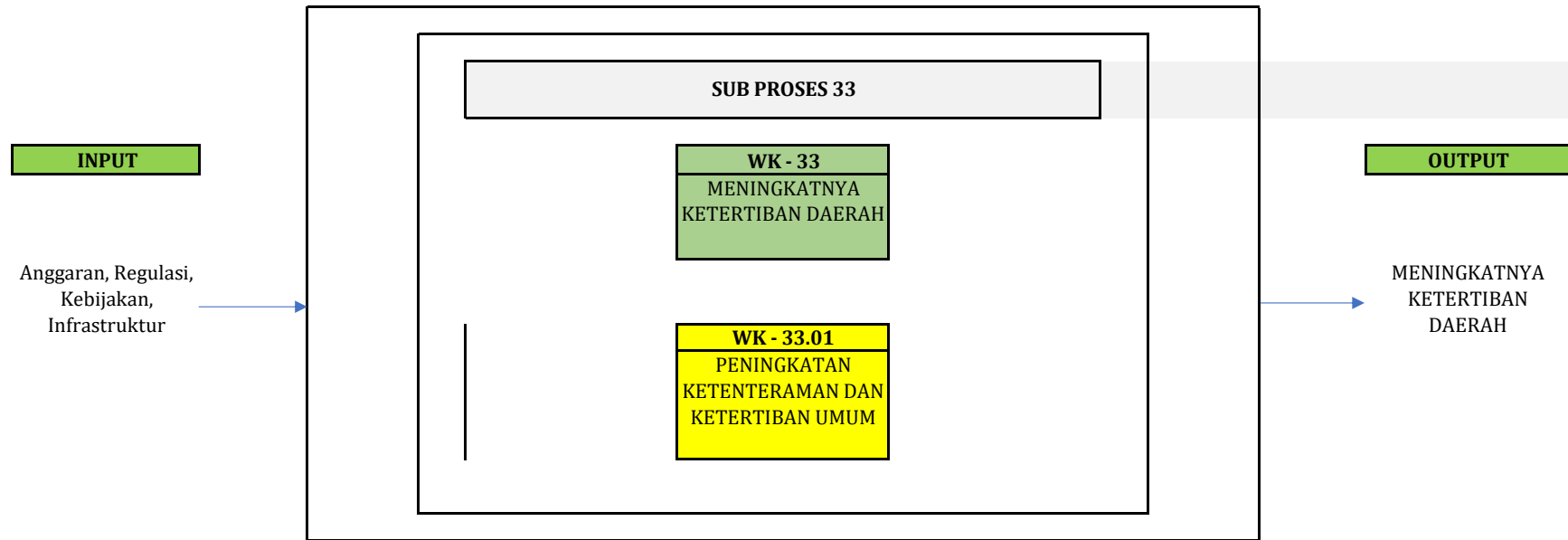
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



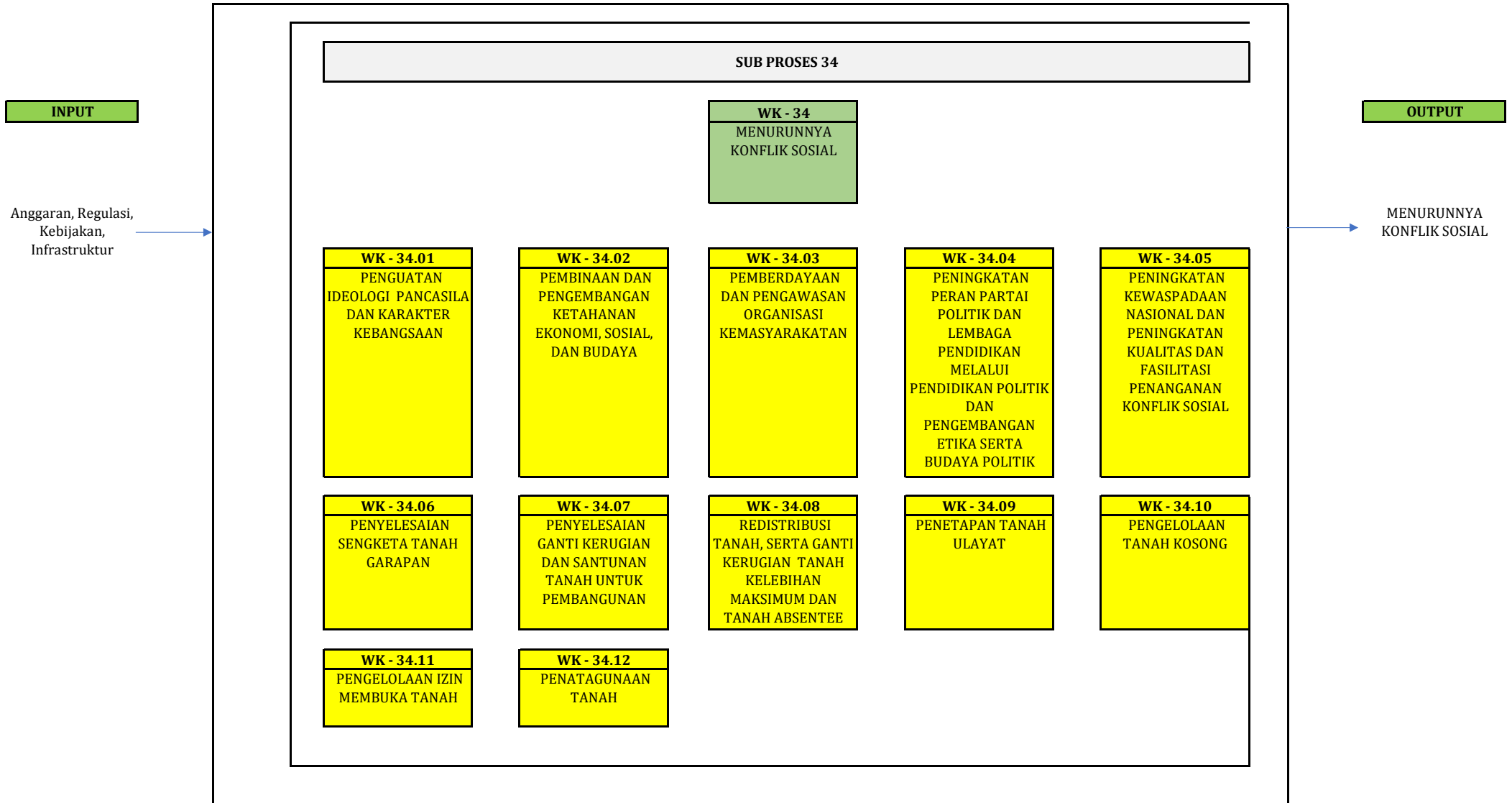
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



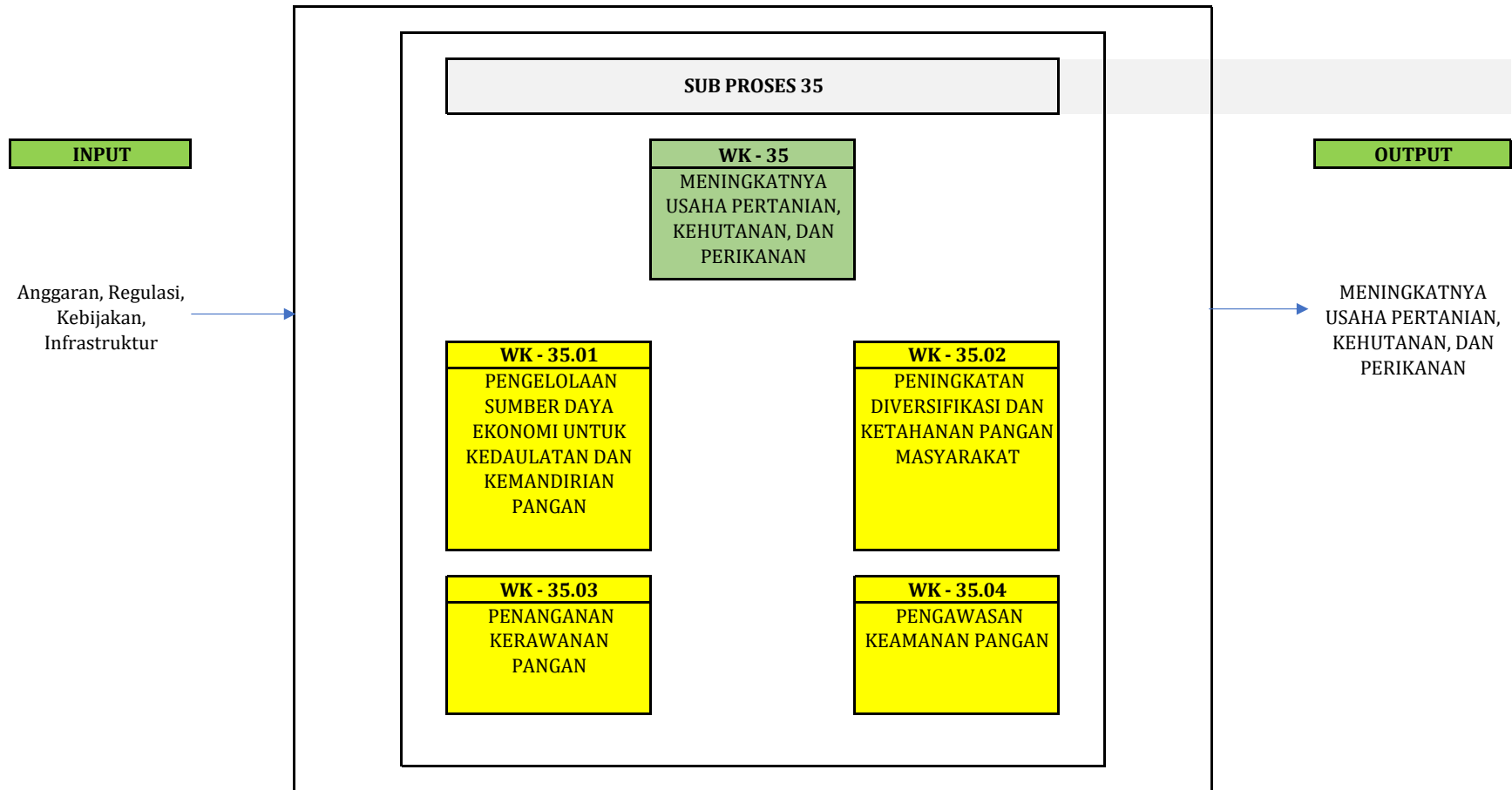
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



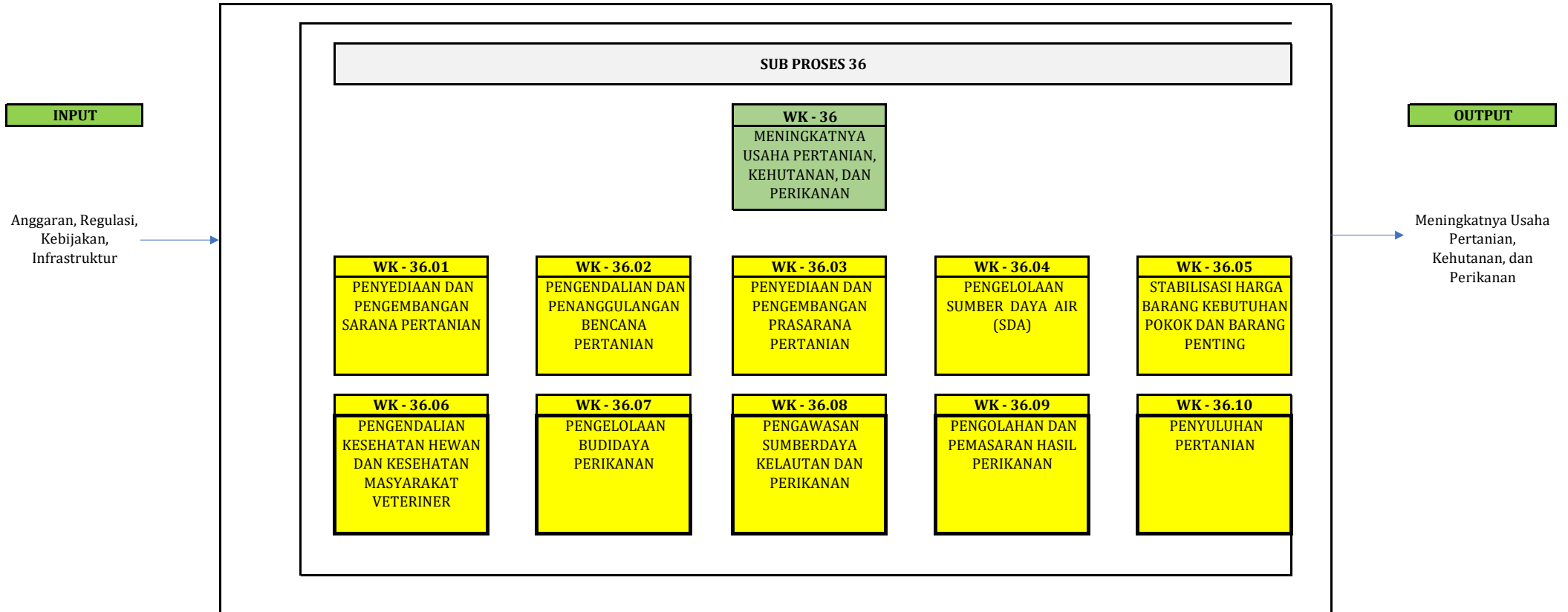
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



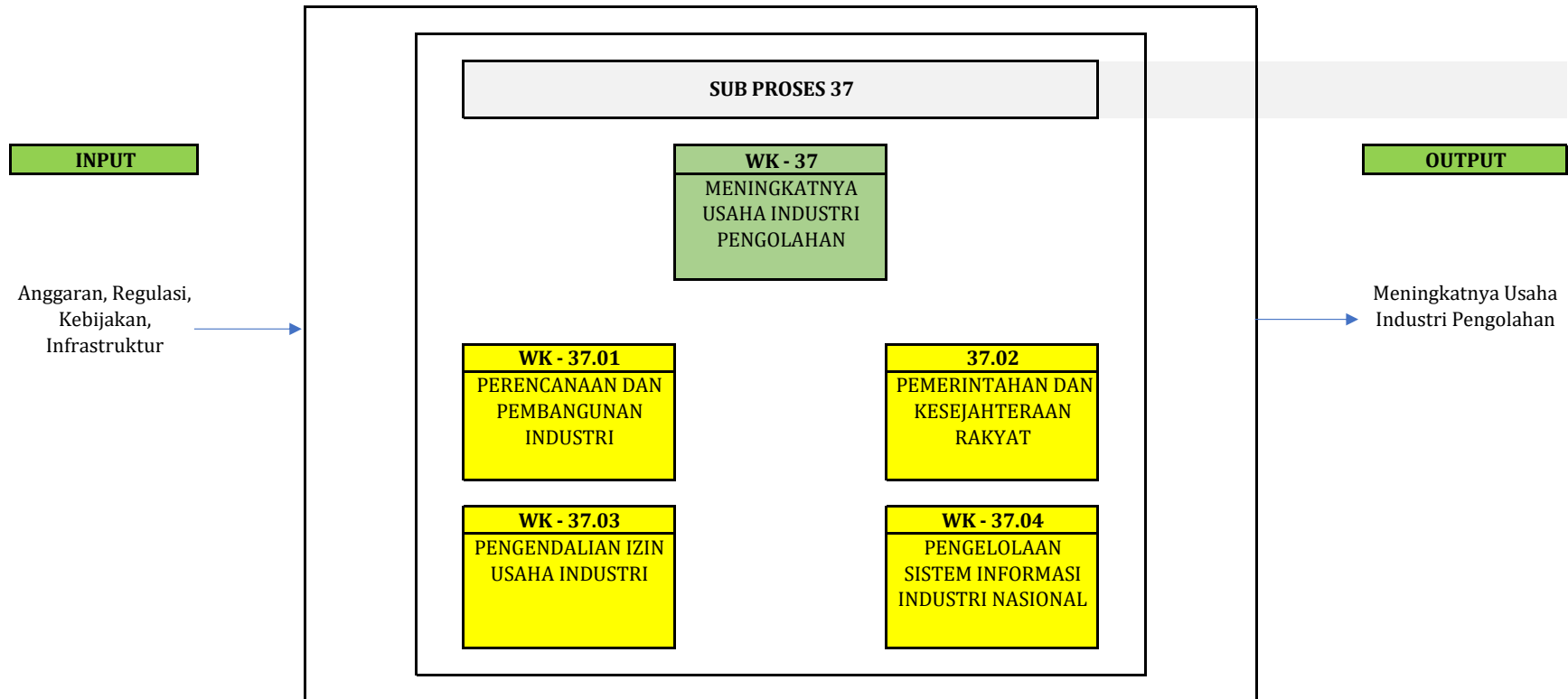
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



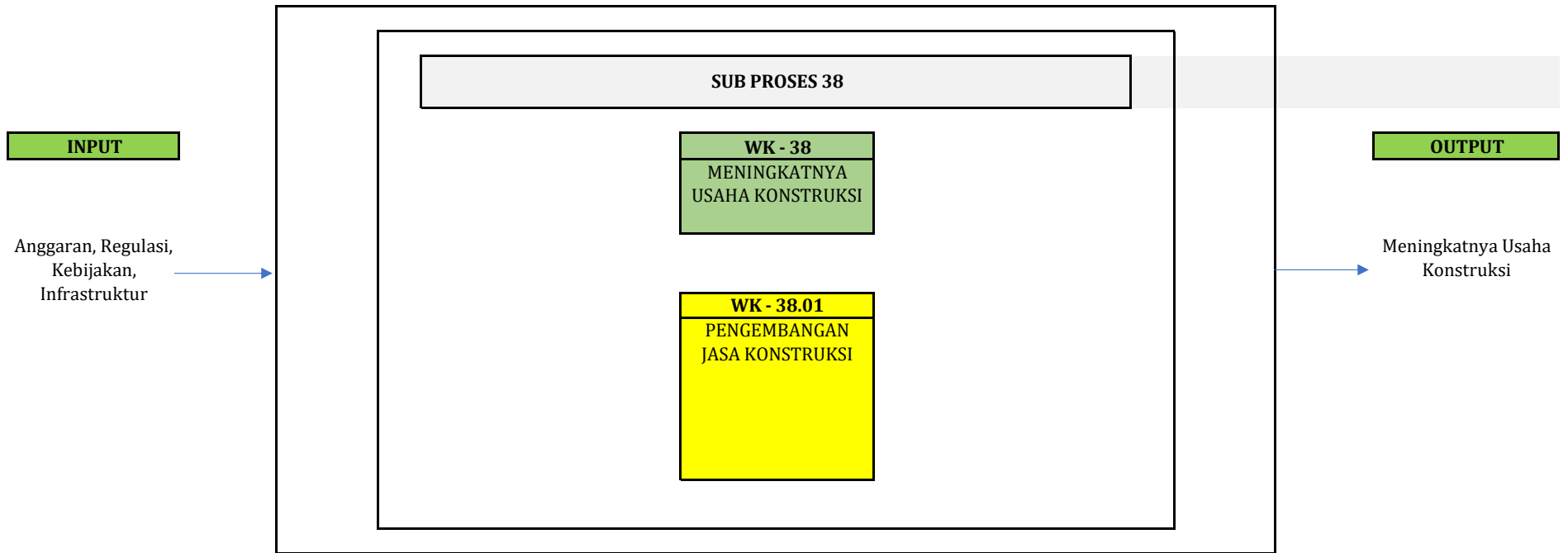
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



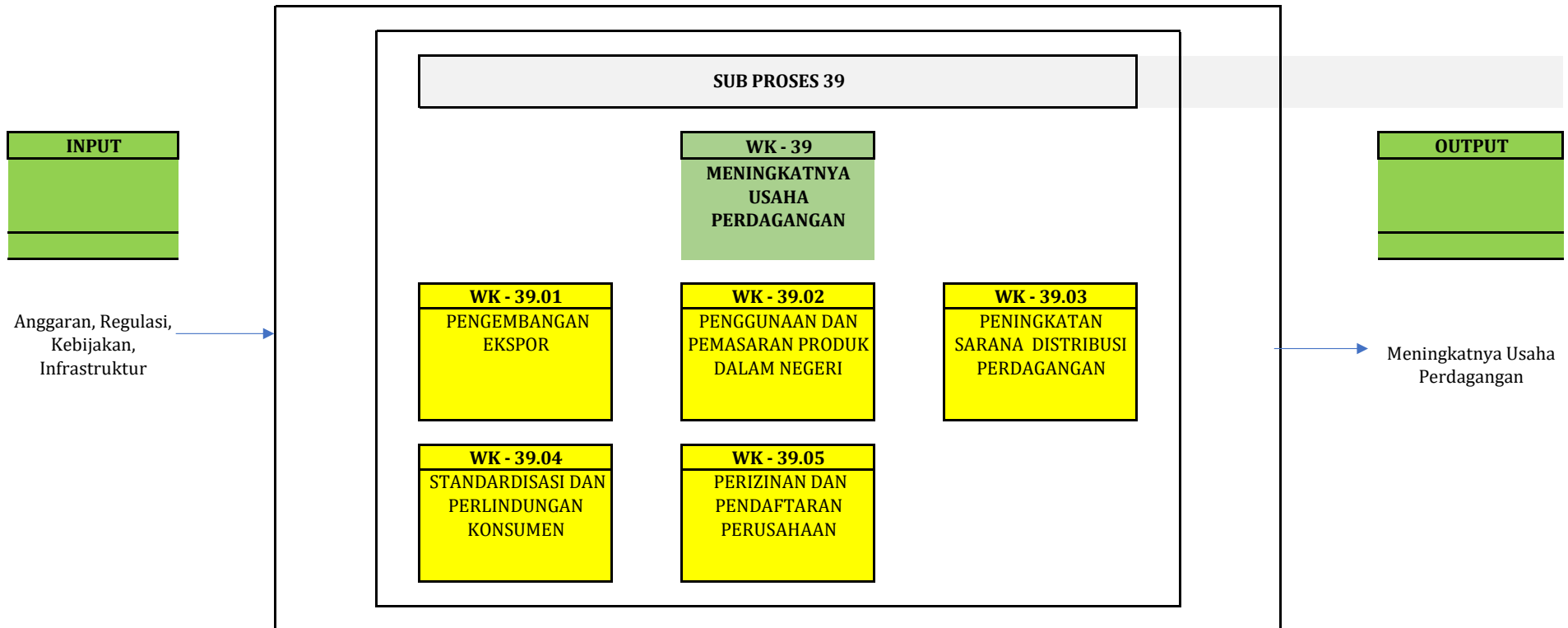
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



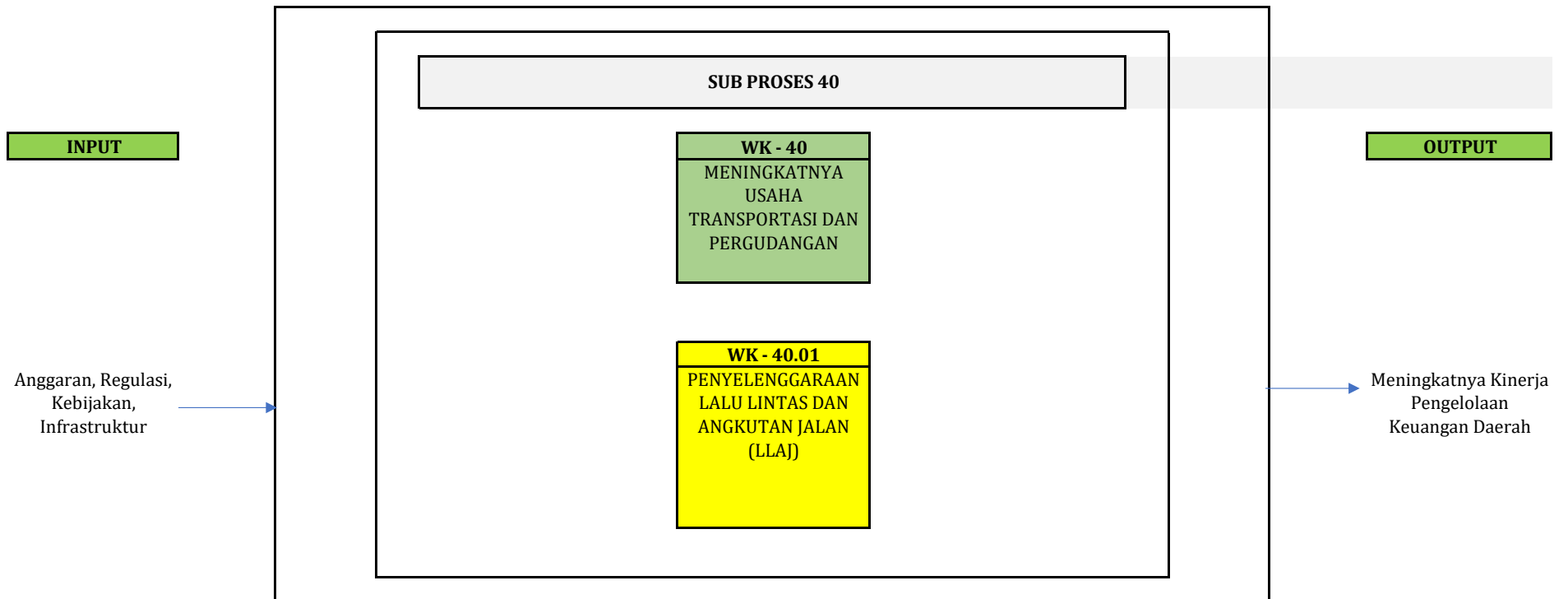
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



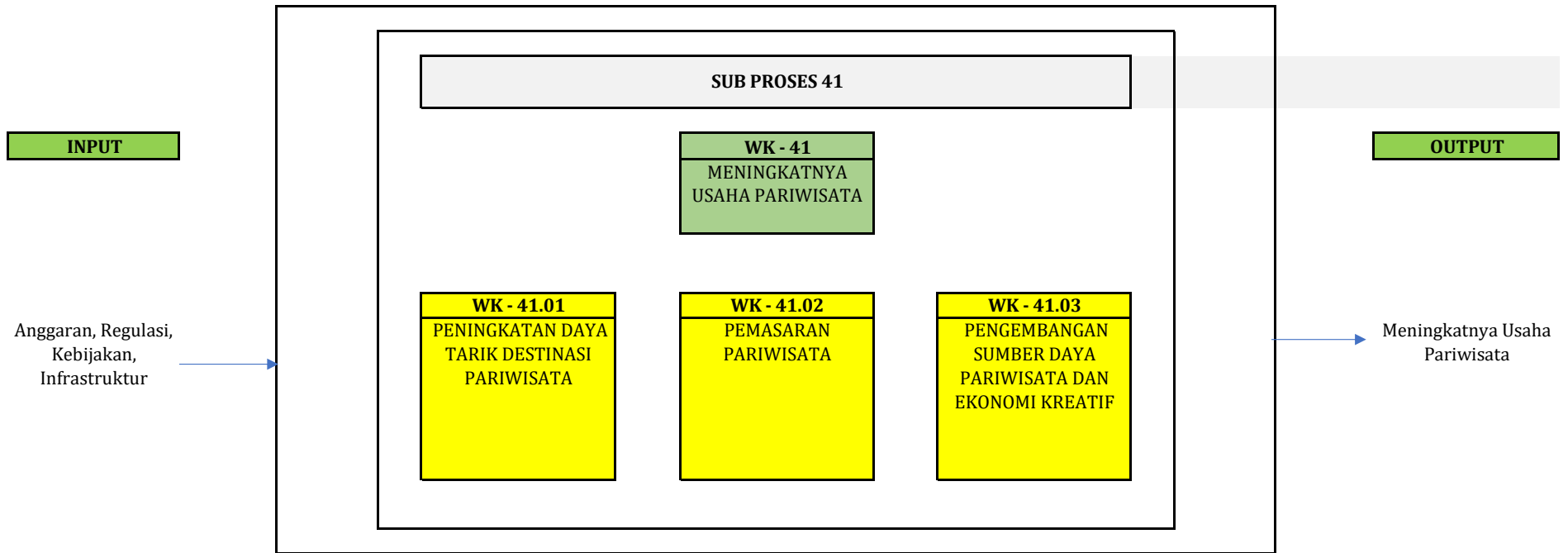
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



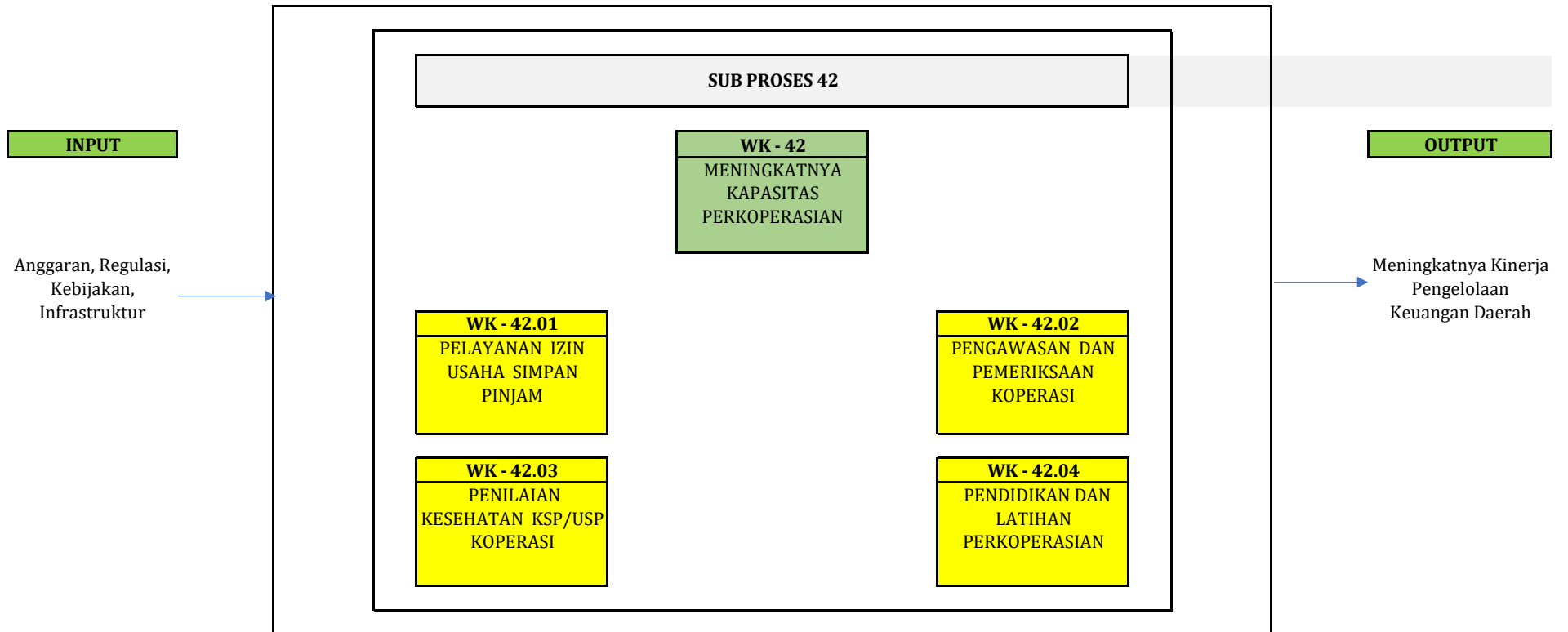
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



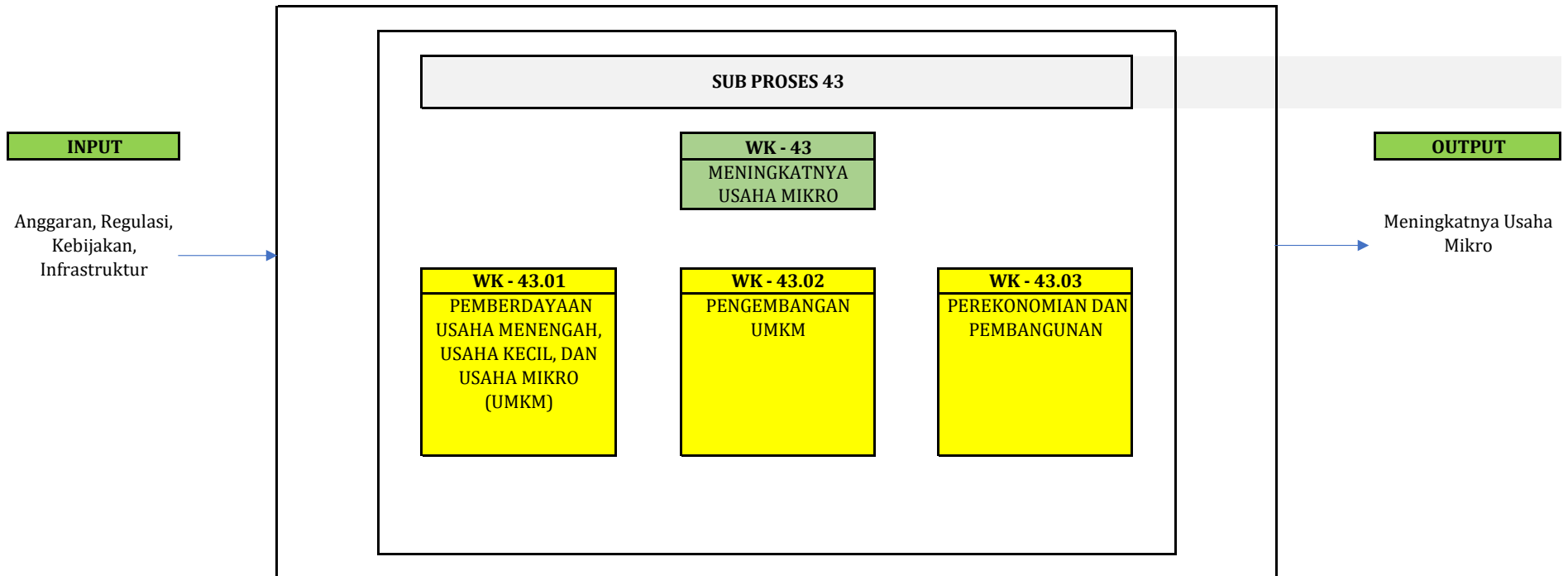
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



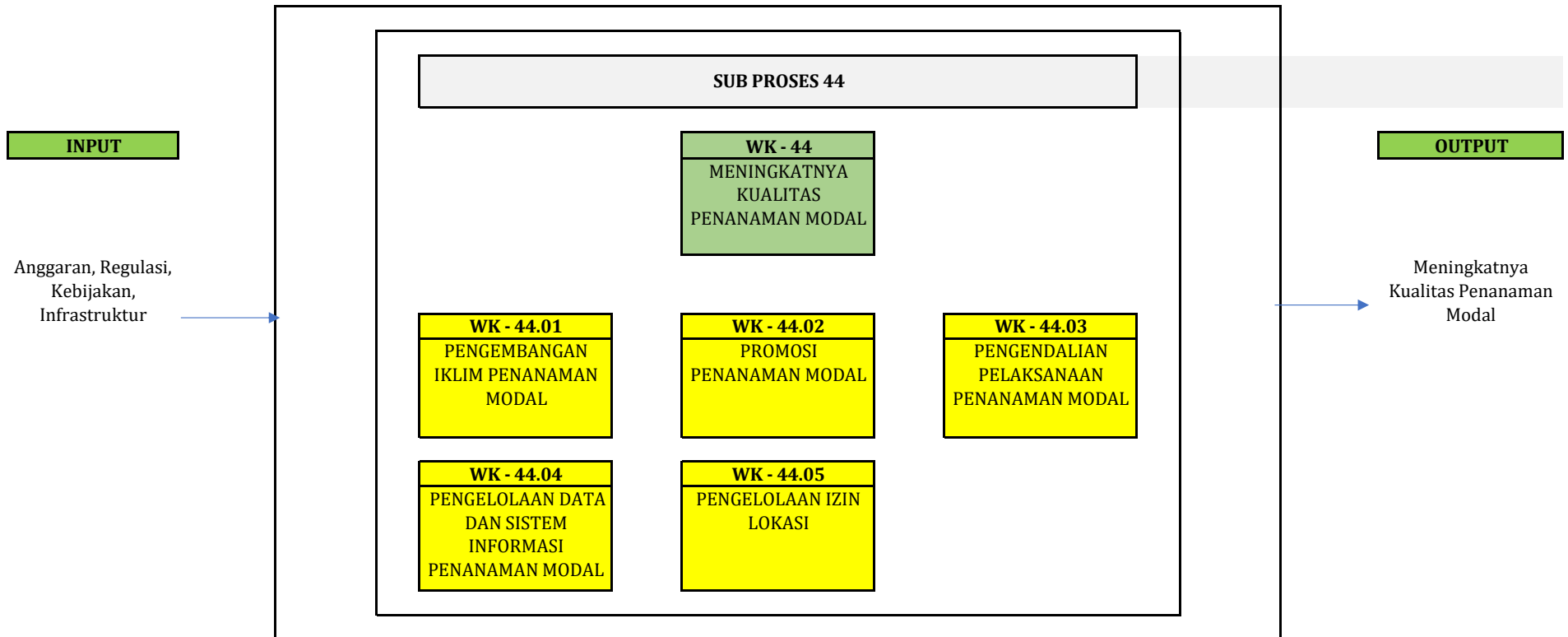
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



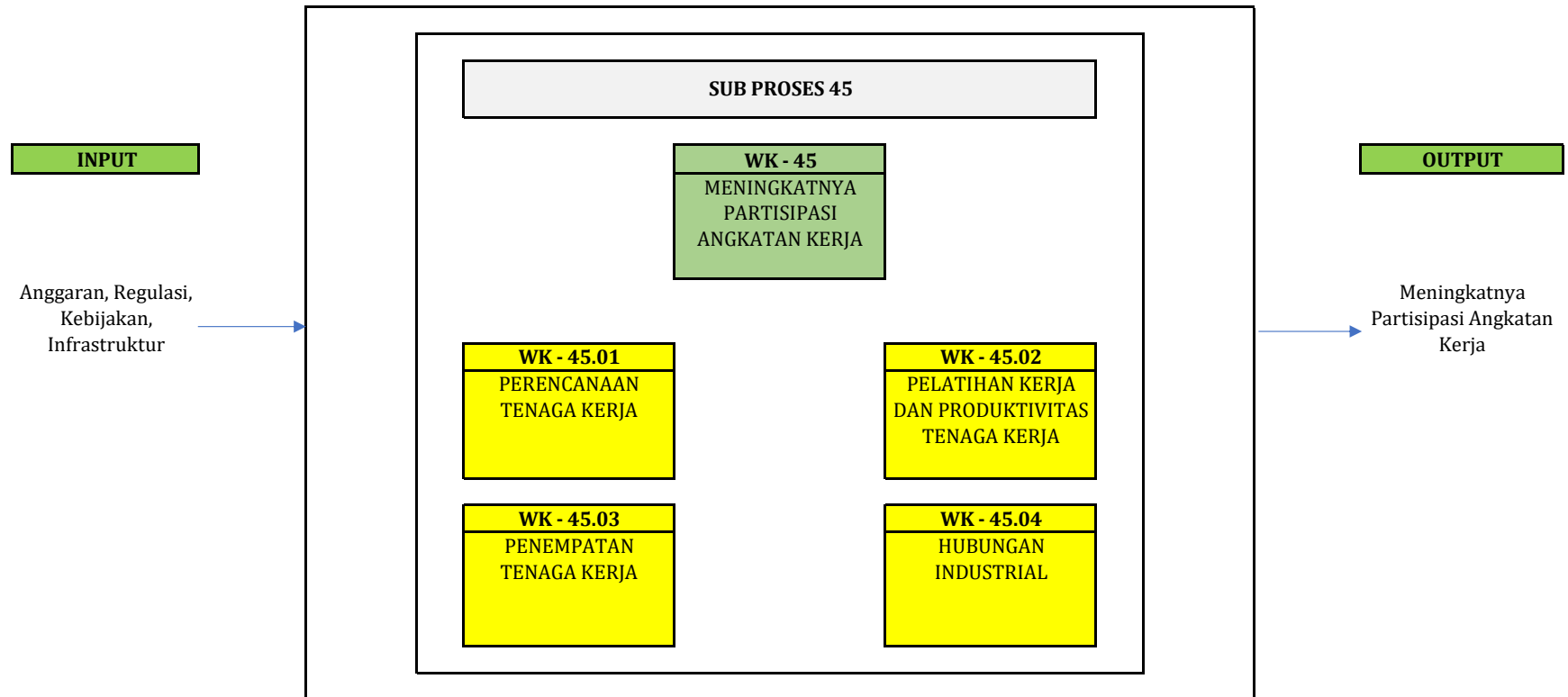
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



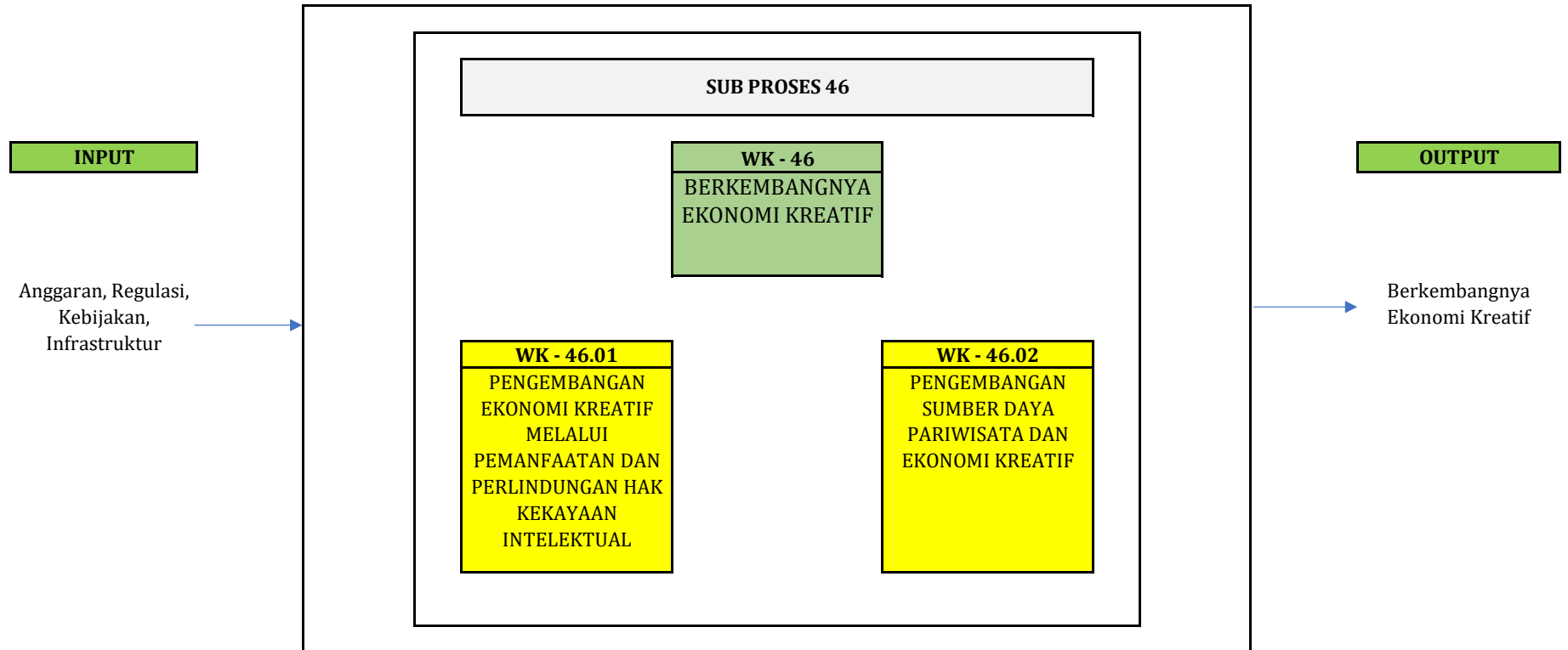
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



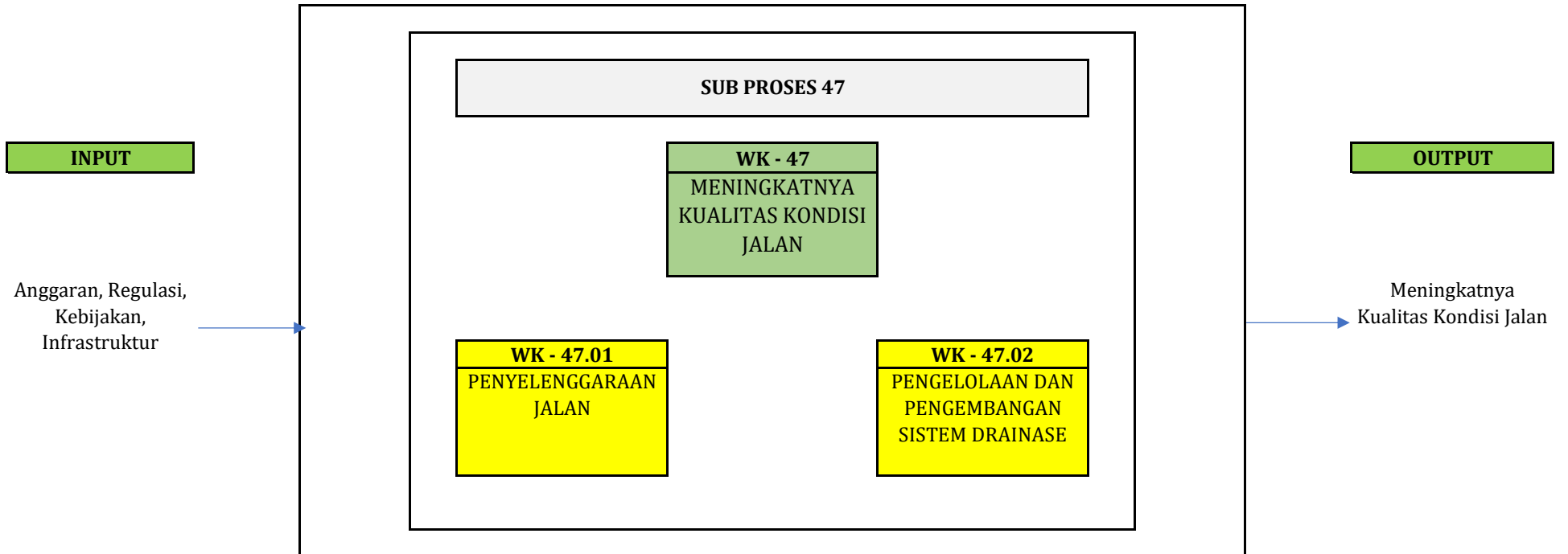
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



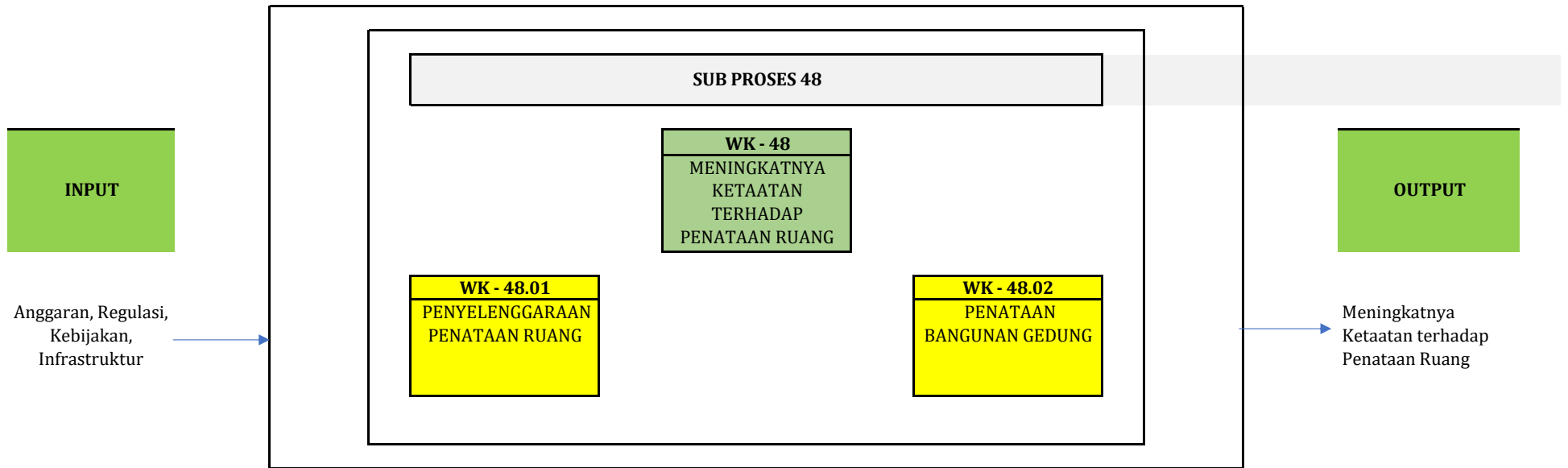
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



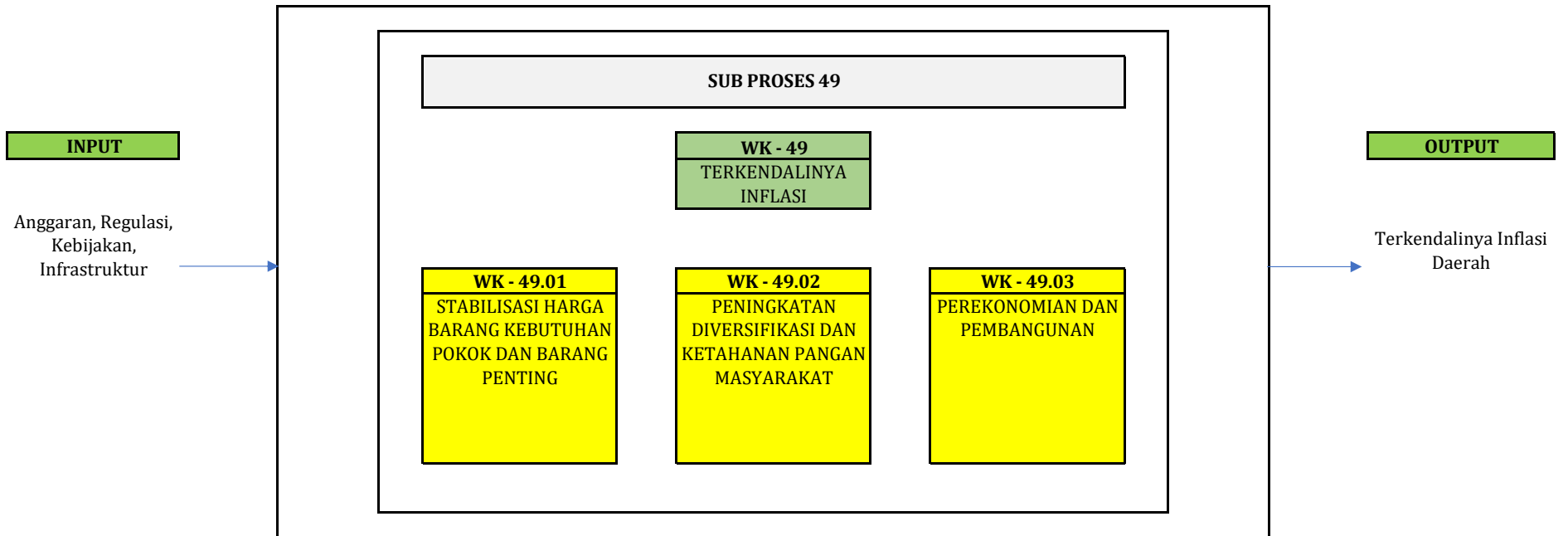
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



PETA SUB PROSES TUJUAN 4



PETA SUB PROSES TUJUAN 4



PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 01.01 CFM 01

Bappeda dan Bag. Adbang	Menyiapkan data terkait Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
Diskominfo, BFKAD			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
Seluruh OPD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 01.02 CFM 01

Bappeda dan Bag. Adbang	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Diskominfo, BPKAD							
Seluruh OPD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 01.03 CFM 01

Bappeda, Bag. Adhbang. Dan Bag. Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan			
Diskominfo, BPKAD			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				
Seluruh OPD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan

Pengelolaan Keuangan Daerah

WK - 02.01 CFM 01

BPKAD	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Keuangan Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah				
Seluruh OPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

WK - 02.02 CFM 01

BPKAD	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Seluruh OPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

WK - 03.01 CFM 01

BAPPEDA	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah		Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah					
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah			
Seluruh OPD						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	
Inspektorat						Mengawasi penegakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

WK - 03.02 CFM 01

BAPPEDA	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah		Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah					
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah			
Seluruh OPD						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	
Inspektorat						Mengawasi penegakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 03.03 CFM 01

Dinas INNDAG, Bagian Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali		Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali				
Bagian Adm. Perekonomian	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali						
Bagian Hukum					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali		
Bagian Hukum dan DPMP/TSP					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali		
Seluruh Perangkat Daerah						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

WK - 04.01 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Perencanaan		Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha		Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha penerapan regulasi	
Bappeda, Disperindag						
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha penerapan regulasi kebijakan Inovasi		

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

WK - 04.02 CFM 01

DINKES	Menyiapkan data terkait pelayanan kesehatan (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan	
Bappeda				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		
Bagian Hukum						

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

WK - 04.02 CFM 01

DINKES	Menyiapkan data terkait pelayanan kesehatan (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan	
Bappeda				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		
Bagian Hukum						

REHABILITASI SOSIAL

WK - 04.04 CFM 01

DINSOS	Menyiapkan data PMKS					melaksanakan kebijakan menurunkan PMKS
		Menyusun bahan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Menyusun bahan kebijakan menurunkan PMKS	Membahas bahan draft kebijakan menurunkan PMKS		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan menurunkan PMKS	Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bappeda						
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan menurunkan PMKS		

PENEMPATAN TENAGA KERJA

WK - 04.05 CFM 01

DISNAKERTANS	Menyiapkan data Tenaga Kerja					melaksanakan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, DINDIK, DISPERINDAG				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas		
Bagian Hukum						

PENCATATAN SIPIL

WK - 04.07 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

WK - 04.08 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WK - 04.10 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

WK - 05.02 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

WK - 06.01 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WK - 06.02 CFM 01

BKPSDM	Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur Tenaga Kerja				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur				
BKPSDM, BKD dan Biro Organisasi			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WK - 06.03 CFM 01

BKPSDM	Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur Tenaga Kerja				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur				
BKPSDM, BKD dan Biro Organisasi			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WK - 07.01 CFM 01

BKPSDM	Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur Tenaga Kerja				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur				
BKPSDM, BKD dan Biro Organisasi			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

WK - 08.01 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD						melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

WK - 08.02 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD						melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

APLIKASI INFORMATIKA

WK - 09.01 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD						melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

WK - 10.01 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD						melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 10.02 CFM 01

Bappeda, Bagian TAPEM	Menyiapkan data terkait Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah			
Diskominfo, BPKAD							
Perangkat Daerah						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah

PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

WK - 10.03 CFM 01

DP3AKB	Menyiapkan data pengarusutamaan gender					melaksanakan kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender
Bagian Kesra		Menyusun bahan kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender	Membahas bahan draft kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender	
Bappeda Perangkat Daerah						
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender		

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WK - 10.04 CFM 01

Dukcapil	Menyiapkan data Administrasi kependudukan					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, Dukcapil			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Seluruh SKPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

WK - 10.05 CFM 01

Dukcapil	Menyiapkan data Administrasi kependudukan					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, Dukcapil			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Seluruh SKPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

WK - 33.01 CFM 01

Satpol PP	Menyiapkan data terkait Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bagian Adm. Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Dinas Kominfo					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Bagian Hukum						

PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

WK - 35.01 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	↓			→	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	↓			
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	→		
Dinas Kominfo				↓		
Bagian Hukum					↑	
				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		
					→	

PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

WK - 35.03 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Penanganan Kerawanan Pangan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan		
Bagian Hukum						

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

WK - 35.04 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Pengawasan Kamanan Pangan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengawasan Kamanan Pangan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan		
Bagian Hukum						

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

WK - 36.01 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian		
Bagian Hukum						

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

WK - 36.02 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
Bagian Hukum						

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

WK - 36.03 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian		
Bagian Hukum						

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

WK - 36.04 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
Bagian Hukum						

STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

WK - 36.05 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
Bagian Hukum						

PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

WK - 36.06 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Bagian Hukum						

PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN

WK - 36.07 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Budidaya Perikanan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Budidaya Perikanan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Budidaya Perikanan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Budidaya Perikanan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Budidaya Perikanan			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Budidaya Perikanan		
Bagian Hukum						

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WK - 36.08 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		
Bagian Hukum						

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

WK - 36.09 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
Bagian Hukum						

PENYULUHAN PERTANIAN

WK - 36.10 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Penyuluhan Pertanian					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian		
Bagian Hukum						

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

WK - 37.01 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Perencanaan dan Pembangunan Industri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri		

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

WK - 37.02 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Fasilitas Pengembangan Industri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Fasilitas Pengembangan Industri
Bagian Adm. Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri		

PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

WK - 37.03 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Pengendalian Izin usaha Industri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian Izin usaha Industri
Bagian Adm. Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri		

PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

WK - 37.04 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Sistem Informasi Industri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Bagian Adm. Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri	
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri		

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

WK - 38.01 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data terkait Pengembangan Jasa Konstruksi					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi		

PENGEMBANGAN EKSPOR

WK - 39.01 CFM 01

Dinas Perindag	Perencanaan, penyusunan Bahan dan undangan	Rapat Pembahasan	Verifikasi	Penyelenggaraan Eskpor	Penyusunan Laporan	Pengawasan	
Perangkat Daerah							
Bappeda							
Inspektorat							

```

    graph TD
      subgraph "Dinas Perindag"
        A[Perencanaan, penyusunan Bahan dan undangan]
      end
      subgraph "Perangkat Daerah"
        B[Rapat Pembahasan]
      end
      subgraph "Bappeda"
        C[ ]
      end
      subgraph "Inspektorat"
        D[ ]
      end
      subgraph "Dinas Perindag"
        E[Verifikasi]
      end
      subgraph "Perangkat Daerah"
        F[Penyelenggaraan Eskpor]
      end
      subgraph "Bappeda"
        G[ ]
      end
      subgraph "Inspektorat"
        H[ ]
      end
      subgraph "Dinas Perindag"
        I[Penyusunan Laporan]
      end
      subgraph "Inspektorat"
        J[Pengawasan]
      end
      A --> B
      B --> E
      E --> F
      F --> I
      I --> J
  
```


PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

WK - 39.02 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		

PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

WK - 39.03 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

WK - 39.04 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

WK - 39.05 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)

WK - 40.01 CFM 01

Dinas Perhubungan	Menyiapkan data terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		

MENINGKATNYA USAHA PARIWISATA

WK - 41.01 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pariwisata					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		

PEMASARAN PARIWISATA

WK - 41.02 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pemasaran Pariwisata					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata		

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WK - 41.03 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

WK - 42.01 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait Usaha Simpan Pinjam					melaksanakan kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam	
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam		

```

    graph TD
      A[Menyiapkan data terkait Usaha Simpan Pinjam] --> B[Menyusun bahan kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam]
      B --> C[Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam]
      C --> D[Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam]
      D --> E[Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam]
      E --> F[melaksanakan kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam]
  
```

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

WK - 42.02 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					melaksanakan kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		

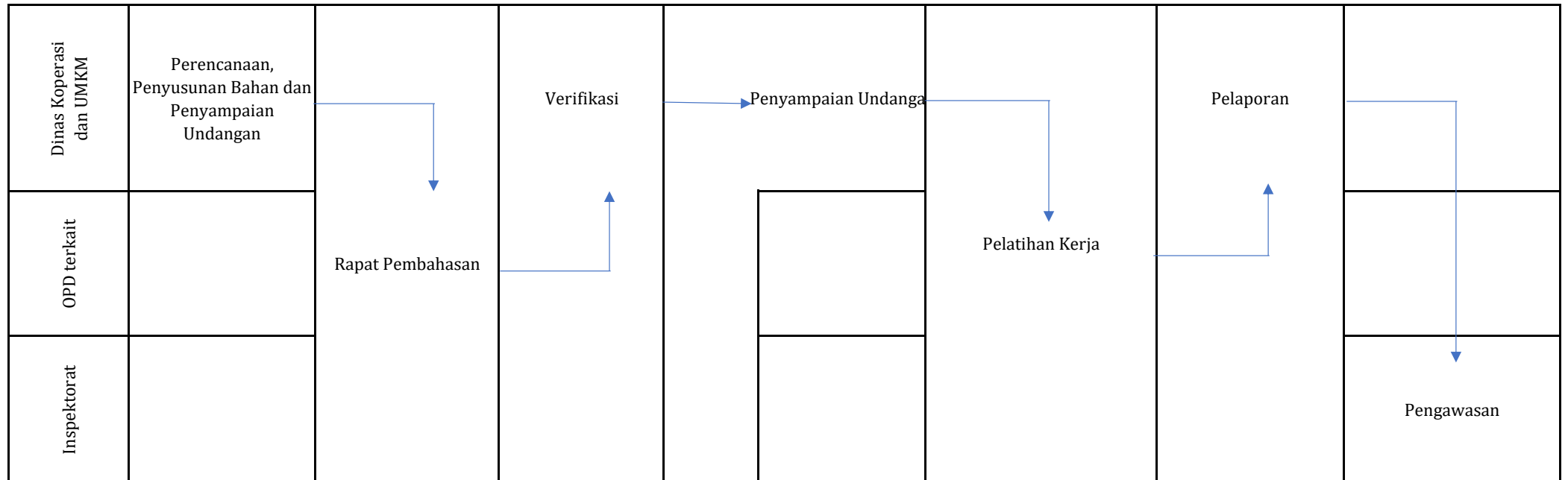
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

WK - 42.03 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					melaksanakan kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

WK - 42.04 CFM 01



PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

WK - 43.01 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait UMKM					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi UMKM			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM	
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM		

PENGEMBANGAN UMKM

WK - 43.02 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data Pengembangan UMKM					melaksanakan kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM	
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM		

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 43.03 CFM 01

Bappeda, Bag. Adbang- Dan Bag. Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan			
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				
Diskominfo, BPKAD								
Seluruh OPD							melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	
Inspektorat								Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

WK - 44.01 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha		

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

WK - 44.02 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Pengembangan Iklim Penanaman Modal					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal		

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

WK - 44.03 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					melaksanakan kebijakan Inovasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

WK - 44.04 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal					melaksanakan kebijakan Inovasi Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	
Bappeda, Diskominfo, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal		

PENGELOLAAN IZIN LOKASI

WK - 44.05 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Izin Lokasi					melaksanakan kebijakan Inovasi Izin Lokasi
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Izin Lokasi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Izin Lokasi	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Izin Lokasi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Izin Lokasi		

```

    graph TD
      A[DPMPSTP: Menyiapkan data terkait Izin Lokasi] --> B[Bagian Adm. Perekonomian: Menyusun bahan kebijakan dalam Izin Lokasi]
      B --> C[Bappeda, DISPERINDAG: Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Izin Lokasi]
      C --> D[Bagian Hukum: Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Izin Lokasi]
      D --> E[DPMPSTP: melaksanakan kebijakan Inovasi Izin Lokasi]
  
```

PERENCANAAN TENAGA KERJA

WK - 45.01 CFM 01

Dinas Nakertrans	Menyiapkan data Tenaga Kerja					melaksanakan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, DINDIK, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas		

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

WK - 45.02 CFM 01

Dinas Nakertrans	Perencanaan, Penyusunan Bahan dan Penyampaian Undangan		Verifikasi		Penyampaian Undangan		Pelaporan
OPD terkait		Rapat Pembahasan				Pelatihan Tenaga Kerja	
Inspektorat							

PENEMPATAN TENAGA KERJA

WK - 45.03 CFM 01

Dinas Nakertrans	Perencanaan, Penyusunan Bahan dan Penyampaian Undangan	Rapat Pembahasan	Verifikasi		Penyampaian Undangan	Penempatan Tenaga Kerja	Pelaporan		
OPD terkait									
Inspektorat									

HUBUNGAN INDUSTRIAL

WK - 45.04 CFM 01

Dinas Nakertrans	Menyiapkan data Hubungan Industrial	Penyusunan Regulasi Daerah dibidang Hubungan Industrial	Penyusunan Juklak dan Juknis		Identifikasi Masalah HI		Pencegahan Perselisihan HI		Monev HI
Bagian Kesra									
Bagian Hukum									
Perusahaan/ Badan Usaha									
Serikat Pekerja									

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

WK - 46.01 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pariwisata					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WK - 46.02 CFM 01

Dinas Porapar	Rapat Persiapan	Rapat Koordinasi	Seleksi Peserta		Karantina	Pelaksanaan Kegiatan	Pentuan Kontingen Kabupaten		Pengiriman Muli Mekanai Way Kanan		Laporan Pelaksanaan Kegiatan		
Pemuda dan Pemuda													
Sat Pol PP													
Dinas Perhubungan													

PENYELENGGARAAN JALAN

WK - 47.01 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data kondisi Infrastruktur Jalan						melaksanakan kebijakan peningkatan infrastruktur jalan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyiapkan data kondisi Infrastruktur Jalan				Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan peningkatan infrastruktur jalan	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan peningkatan infrastruktur jalan		Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan peningkatan infrastruktur jalan		
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Infrastruktur Jalan			
Dinas Perkimtah							
Dinas Perhubungan							

PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

WK - 47.02 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data kondisi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Membahas bahan draft kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				melaksanakan kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Bagian Adm. Pembangunan		Menyiapkan data kondisi IPengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Bappeda					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
Bagian Hukum					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
Dinas Perkimtaha							
Dinas Perhubungan							

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

WK - 48.01 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang					melaksanakan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
dinas Perkimtah						

```

    graph TD
      A[Menyiapkan data Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang] --> B[Menyusun bahan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang]
      B --> C[Membahas bahan draft kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang]
      C --> D[Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang]
      D --> E[Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang]
      E --> F[melaksanakan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang]
  
```

PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

WK - 48.02 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data Penataan Bangunan Gedung		Membahas bahan draft kebijakan Penataan Bangunan Gedung			melaksanakan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan Gedung
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Penataan Bangunan Gedung				
Bappeda					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Penataan Bangunan Gedung	
Bagian Hukum					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Penataan Bangunan Gedung	
dinas Perkimtah						

STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

WK - 49.01 CFM 01

Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan	Perencanaan, Penyusunan Bahan, dan Undangan	Rapat Pembahasan	Verifikasi	Penataan Stabilitas Harga	Penyusunan Laporan		
OPD terkait			↑		↑		
Bagian Hukum							
Insektorat						Pengawasan	

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

WK - 49.02 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Ketahanan Pangan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan	
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan		
Bappeda, Dinas TPPP, Dinas Ketahanan Pangan							
Bagian Hukum					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan		

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 49.03 CFM 01

Bappeda dan Bag. Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan			
Diskominfo, BPKAD			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				
Seluruh OPD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan